FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) BUKITTINGGI

(Studi Gerakan dan Pandangan Politik)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syari'ah

Oleh :

LELI RAMAYANIS
NIM: 1314.012

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1439 H / 2018 M

Halaman Persembahan

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ....

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...(QS.Al- Baqarah 286)

Assalamu'alaikum wr,wb

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).(QS. Asy- Syarh : 5-7)

Duhai Dzat Pemilik Semesta, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, syukurku keharibaan mu. Dengan rintangan dan halangan yang sering kurasa tak sanggup, alhamdulillah penelitian ini terselesaikan dalam waktu yang seharusnya.

Karya kecil nan sederhana ini KU persembahkan untuk:

Ama terkasih, ROSDIANA.....
Terimakasih Ma, telah bersedia menghantarkan ku kedunia ini dengan hidupmu yang kau pertaruhkan
Tetesan air susumu yang mengalir di tubuh ini, suapan demi suapan kesabaran mu yang mengiringi tumbuhnya gadis kecil ini dan tegas mu dalam kasih yang senantiasa membimbing tangan dan kaki ini tuk melangkah.
Do'a mu Ma adalah azimat terbaikku dikala kekecewaan dan lelah melanda. Semua mampu kubendung dengan ingatan, disetiap ku dengar kau bersimpuh kepada-Nya tentang kebaikan untukku..
Harapan dan impian yang kau titipkan dipundakku inilah yang mampu buat ku bertahan Ma, dalam menyelesaikan perjuangan yang harus kuselesaikan...

Lelaki terhebat, Apa MAHYUDIN.....
Cinta pertamaku, sosok yang darinya lah semua sifatku ini digariskan. Sosok hebat yang mampu menjaga 4 putrinya dengan baik. Tetesan keringat yang sering ku dapati dikala sore dikau pulang, lelah mu yang sering kau sembunyikan dengan canda dan kasihmu yang tak henti kau curahkan meski itu bukan dalam dekap atau kata kata sayang. Darimu Pa,kau ajarkan aku kuat kau beri kebebasan dalam keterikatan, sehingga merapi itu dapat kudaki. Karena mu Pa, tetesan keringat dan banting tulang mu lah yang menjadikan si manis ini Sarjana, terimakasihku.

Selanjutnya, Uni tersayang Wirdiana Safitri, S.Pd. Generasi pertama pembawa perubahan dalam kerajaan kecil ini. Panutan bagi si adik, dia tegas tapi perhatian dan kepedulian nya tak mampu kutandingi. Uni ku yang terhebat, semoga kapal disegerakan berlayar bersama si Tuan yang telah ditetapkan-Nya.

Desy Rahmadany, si adik yang telah menjadi seorang Bunda. Jadilah sosok madrasah terbaik bagi generasimu dan istri sholehah dalam keluargamu. Dan untuk Junaidi semoga jadi Ayah yang bisa menjadi panutan.

Sukma Mardiana, si bungsu ndak kabaradiak lai. Si manjo ama dan apa, si juara dalam keluarga. Belajar yang rajin ya Nana, semoga Itiqamah di jalan-Nya.

Yang terkasih, anak bujang Mama M. Arfan Nasira, paubek hati palarai gamang. Semoga jadi anak yang sholeh ya nak bujang. Berbakti kepada Ayah Bunda dan cepatlah besar nak bujang, biar mama bisa menggandengmu ke merapi.

Keluarga besar Dt Gunuang (Atuk (allahummaghfirlahum) sosok penuh wibawa, kawan bacarito dan lawan debat tiok pulang, Mak gaek nan selalu memberi petuah tentang kahidupan,Mak Adang,Mak Etek,dll), terimakasih atas dorongan dan semangat yang tiada henti.

Para Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag.selaku pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan yang telah Bapak berikan dan waktu yang telah diluangkan untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Bapak Beni Firdaus, S.Hi, MA selaku pembimbing II.Terimakasih atas bimbingan dan kesabaran yang telah Bapak berikan, sehingga dalam 4 bulan ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
Para dosen penguji (Ibu Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag dan Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag).

Rangkaian terimakasih ini juga kepada HTN 14 Community, minoritas berkualitas 19 sosok muda kini tinggal 17 lagi raga yang bertahan dalam jalan juang ini. kini 9 sosok muda telah mulai menghidupkan lenteranya: Nurhidayati, SH (si uni rempong tapi keren), Fitri Fauziah, SH (ai, si mars sang penyeimbang), Siska Hariani, SH (si penyayang nan baik), Nurul Hamidah, SH (si misterius), Devia Hengki, SH (kiylan nan baik), Agung Surya Putra,SH, Fauzan MZ, SH, Andrian Andika Saputra, SH dan 7 lagi yang masih berjuang (My Bro, Riko, Fizan, Almi, Imam,Latif, Edo) .

Teruntuk kos sayang nenek,tempat pulang dan saksi bisu perjuangan selama 4 tahun ini. Nenek yang meski kadang cerewet tapi selalu khawatir terhadap cucu-cucu kos nya dan untuk kawan saatok sapatiduran Nadia Oktarianti, SH (si ukhti nan pangambok,tapi sosok baik dan si pengingat ali dikala mulai nakal) dan Febrina Sari, SH (teman kecil yang dipersatukan kembali dalam meraih

mimpi,cukup kita yang tau betapa uniknya kita dalam berteman,kimie), cimon (segerakan munaqasah cimon kalau ndak munakahat juga boleh), Ade Rahmiati(adiak kos nan cengeng, semangat kuliahnya dan jaga diri baik-baik yaa).

KITA, ketika si perantau mars dan venus disatukan oleh si penduduk bumi dalam lingkaran kecil. Tidak banyak yang mengerti cukup KITA dan kenyamanan selama ini. Terimakasih telah menyayangi dan menjaga dalam ukhwah yang tak bersyarat ini.

Salam ukhwah dan terimakasih atas do'a dan dukungannya Keluarga Surga UKMD 'Azzamul 'Iffah, SGF 14, Forum An-Nisa khusus nya adik-adik garegeh, semangat yaa dik-adik (Zikra, Tya, Nur,Pipin cengeng, hanifah,devi dan akhwat tangguh laiinya maaf kk gak bisa sebutin namanyasemua. Juga buat sosok kakak keren yang sekarang telah menjadi Ibu dari Salim, syukran kk kau ajarkan ku tentang cintadan syurga-Nya.

Yang terhebat Family 155, terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu ada di 2 tahun terakhir ini. Nama-nama hebat itu: Si Ketua (nama yang belum bisa dinamai, si pakawan dan calon cekgu penyayang, S.Pd), Uswat (calon pengusaha muda dari pasaman timur, SE), Bunda (sosok terbaik yang selalu ada, kapalo arak 155, SE), Chae (panyandek tapi calon cekgu yang baik, S.Pd), Bukyu (konselor hati yang masih mencari ketetapan hati, semoga Istiqamah, S.Pd), Bukvik (bendahara keluarga, calon pengusaha muda masih dari Pastim, SE), Melmel (si perantau dari jambi, semoga sukses yaa mel" semoga disegerakan, SE), Bukfen (semangat bukfen, si pejuang april). Semoga tetap kompak dan jaga persaudaraan ini family 155.

Untukmu yang selalu ada,,,,
Terimakasih telah menjadi hati yang menguatkan, kaki yang senantiasa menopang diri ini dan jiwa yang senantiasa menyertai.
Aku tau, perjalanan ini cukup melelahkan bahkan tak jarang luka yang harus disembuhkan sendiri
Berjuang dan bertahan dalam jalan yang tak pernah dimimpikan, tapi harus diselesaikan
Aku masih ingat bagaimana mata itu tak henti menangis,bagaimana jantung itu mulai melemah berdetak
Dan tentang jiwa yang mulai menolak dengan takdir yang ditorehkan-Nya
Ku akui kamu hebat, sebagai hamba kau cepat menyadari posisimu
Tugasmu hanya berusaha dan memohon, segala keputusan tetap di tangan-Nya
Percayalah, bahkan didetik terakhir ini pun ketika jari jari ini menuliskan kata persembahan, Kau masih harus menguatkan hatimu,
berharap semua baik-baik saja
Tetaplah disini, perjuangan kita masih panjang, harapan itu masih ada
Gapailah mimpi itu, karena kamu layak tuk jadi seorang pemenang,

-"ALJ"-

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leli Ramayanis

Nim : 1314.012

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tatanegara

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) BUKITTINGGI (Studi Gerakan dan Pandangan Politik)** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Agustus 2018

Penulis,



Leli Ramayanis

Nim: 1314.012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Front Pembela Islam (FPI)Bukittinggi (Studi Gerakan dan Pandangan Politik)** yang telah disusun oleh **Leli Ramayanis, NIM. 1314.012,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 02 Agustus 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Ismail, M.Ag	**Beni Firdaus, S.Hi, MA**
NIP.19680409 199403 1 008	**NIP.19790714 200501 1 005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Gerakan Front Pembela Islam (FPI) Bukittinggi (Studi Gerakan dan Pandangan Politik)"**, yang disusun oleh **Leli Ramayanis**, **NIM. 1314.012** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara.

Bukittinggi, 31 Agustus 2018

Tim Penguji Munaqasyah,

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Ismail, M.Ag	**Beni Firdaus, S.HI, MA**
NIP. 19680409199403 1 008	**NIP. 19790714200501 1 005**

Anggota,

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 19631130199203 2 001	**NIP. 19760322200501 1 010**
Dr. H. Ismail, M.Ag	**Beni Firdaus, S.HI, MA**
NIP. 19680409199403 1 008	**NIP. 19790714200501 1 005**

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212199303 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Front Pembela Islam (FPI) Bukittinggi (Studi Gerakan dan Pandangan Politik)**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Bukttinggi.

Selanjutnya shalawat beserta salam buat Nabi Muhammad SAW *uswatun hasanah* bagi kita semua. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya kelak.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada Papa tercinta **Mahyudin** dan Mama terkasih **Rosdiana** yang telah berjuang lebih dari yang ananda lakukan selama ini. Teruntuk uni **Wirdiana Safitri, S.Pd**, **Desy Rahmadani**, **Sukma Mardiana** dan sang pangeran kecil **Muhammad Arfan** sosok-sosok yang selalu ada mendampingi dalam perjuangan ini.

Ucapan terimakasih juga ananda ucapkan kepada:

1. Ibu Rektor Dr. Ridha Ahida, M.Hum, Bapak Asyari, S.Ag, M.Si selaku Wakil Rektor I, Bapak Novi Hendri, M.Ag selaku Wakil Rektor II dan Ibu Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr. Arsal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
4. Ibu Elfiani, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
5. Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
6. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag selaku pembimbing I. Terimakasih kepada Bapak atas bimbingan, arahan dan kesabaran serta waktu yang diluangkan untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Beni Firdaus, S.Hi, MA. Terimakasih kepada Bapak yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh anggota FPI Bukittinggi khususnya Buya Busra, Inyiak Yustanur, Ustadz Khairul Azmi dan Bang Rusdi yang telah menyumbangkan pikiran dan waktu untuk terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah Bapak dan Ibu berikan serta semua pihak yang telah berkontribusi dibalas oleh Allah SWT dengan pahala

yang berlipat ganda. Aamiin.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat peneliti harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi peneliti, Front Pembela Islam Bukittinggi serta Mahasiswa IAIN Bukittinggi khususnya Program Studi Hukum Tatanegara.

Bukittinggi, 02 Agustus 2018

Peneliti

LELI RAMAYANIS
NIM: 1314.012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v

BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan 7
E. Penjelasan Judul 8
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 13

BAB IIGERAKAN DAN PANDANGAN POLITIK DI INDONESIA
A. Gerakan Islam di Indonesia 14
1. PengertianGerakan Islam 14
2. Macam-Macam Gerakan Islam 15
B. Pemikiran Politik Modern 32
1. Tipologi Hubungan Organik dan Bentuk Pemerintahan Teo Demokrasi 32
2. Tipologi Sekuler dalam Pemikiran Politik Islam Modren ... 38
3. Tipologi Moderat dan BentukPemerintahan Ideal dalam Pemikiran Islam Modren 42

BAB III GAMBARAN UMUM FPI BUKITTINGGI
A. Latar Belakang Berdirinya DPW FPI Bukitinggi 46
B. Visi dan Misi DPW FPI Bukittinggi 48
C. Format Kepemimpinan, Struktur dan Kekuasaan Dalam FPI.. 51
D. Aksi-aksi FPI Bukittinggi dan Prosedur Standar 59
E. Pandangan Politik 63

BAB IVGERAKAN DAN PANDANGAN POLITIK FRONT PEMBELA ISLAM BUKITTINGGI
A. Gerakan Front Pembela Islam Bukittinggi 65
B. Pandangan Politik Front Pembela Islam Kota Bukittinggi..... 70
C. Analisa Penulis terhadap Gerakan dan Pandangan Politik FPI Bukittinggi 74

BAB IVPENUTUP
A. Kesimpulan 79
B. Saran..... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Gerakan Front Pembela Islam (FPI) Bukittinggi (Studi Gerakan dan Pandangan Politik)".** Skripsi ditulis oleh **Leli Ramayanis, NIM: 1314012**, Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439 H/2018 M. Adapun maksud dari judul ini adalah menjelaskan bagaimana gerakan dan pandangan dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam Bukittinggi.

Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini adalah sebagaimana yang diketahui bahwaFront Pembela Islam di Indonesia sering diberitakan sebagai organisasi aliran keras. Kegiatan mereka dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di kota-kota besar sering menjadi pemberitaan media sebagai tindak radikal. Sebagai salah satu ormas yang cukup berpengaruh, FPI terlihat tidak begitu bergerak di bidang perpolitikkan Indonesia. FPI Kota Bukittinggi yang keberadaannya sudah cukup lama, jauh dari pemberitaan negatif.Organisasi ini sering terlibat dalam aksi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana gerakan dan pandangan politik Front Pembela Islam Bukittinggi.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Front Pembela Islam Bukittinggi bukanlah gerakan radikal. Karena, dalam mencapai tujuan organisasi FPI Bukittinggi tidak pernah menggunakan kekerasan. Semua aturan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* telah diatur di dalam Prosedur Standar FPI. Selain itu, FPI Bukittinggi adalah organisasi Islam yang teguh dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan telah menjadi agenda rutin dari organisasi ini. Dari segi pandangan politik, FPI Bukittinggi tidak berafiliasi terhadap satu partai politik atau kekuasaan tertentu. Untuk menjaga kemurnian tujuan organisasi terdapat aturan larangan bagi pengurus FPI untuk ikut berpolitik praktis. Front Pembela Islam Bukittinggi sangat mendukung partai politik serta politisi yang berani untuk menegakkan *syari'at* Islam. Hal tersebut juga didukung dengan pandangan FPI Bukittinggi bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dalam hidup bernegara. Jadi FPI Bukittinggi bukanlah sebuah organisasi politik tetapi menjadikan politik sebagai medan juang untuk menegakkan *syari'at* Islam di Kota Bukittinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebuah organisasi massa Indonesia. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan yang dipelopori oleh seorang *haba'ib*, ulama, mubaligh serta aktivis muslim yaitu Habib Muhammad Rizieq Shihab dan juga dihadiri oleh K.H Cecep Bustomi, HabibIdrus Jamalullail, K.H Damanhuri. Dan pertemuan tersebut sebagai hari kelahiran FPI.[1]

Pemilihan nama "Front Pembela Islam" memiliki makna tersendiri sebagaimana yang terdapat pada AD/ART FPI . Kata "Front" menampilkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk ada di garis terdepan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan.[2]

Kata "Pembela" mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam di mana saja berada. [3]"Islam" mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran syari'at Islam yang lurus, benar, serta menjadi rahmat untuk semesta alam.[4]

Sebagaimana yang tertulis dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, tujuan berdiri FPI adalah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi*

[1]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikaldi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h130

[2]Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Front Pembela Islam

[3]Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Front Pembela Islam

[4]Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Front Pembela Islam

munkar. Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba.[5]

Visi dan Misi dari organisasi FPI adalah penerapan Syari'at Islam secara *Kaaffah* di bawah naungan *Khilaafah Islaamiyyah* menurut *Manhaj Nubuwwah*, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakkan Hisbah dan Pengamalan Jihad.[6]Asas-asas perjuangan FPI yaitu bahwa beriman kepada Allah adalah tujuan tertinggi, Nabi Muhammad adalah teladan, Al Qur'an adalah pedoman yang tertinggi; jihad adalah jalan hidup yang harus ditempuh; dan syahid adalah cita-cita yang senantiasa didambakan. Atas dasar pedoman ini, lahir sebuah semboyan yang terkenal, "hidup mulia atau mati syahid".[7]

Front Pembela Islam muncul karena premanisme dan kemaksiatan tidak mampu lagi dikontrol oleh negara. FPI memiliki corak tersendiri dalam mencegah kemungkaran. Kegiatan utama mereka yaitu merazia tempat-tempat hiburan yang mereka percaya sebagai sarang maksiat seperti klub malam, dikotik, kafe dan kasino .[8]

Sejak berdirinya, FPI berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang berupa pembelaan terhadap umat Islam. Beberapa aksi-aksi FPI dalam mencegah kemungkaran yaitu tanggal 15 Maret 2002, sekitar 300 massa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekar Jaya Billiard di Jalan Prof. Dr. Satriyo no. 240, Karet,

---

[5]Al- Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LkiS,2006) h.90-92

[6]Pasal 6 Anggaran Dasar Front Pembela Islam

[7]Pasal 7 Anggaran Dasar Front Pembela Islam

[8]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004)h.129

Jakarta, pada 16 Oktober 2005 FPI mengusir Jemaat yang akan melaksanakan kebaktian di Jatimulyo Bekasi Timur dan pada tanggal 12 Januari 2018 anggota FPI mengadakan demo di Kantor Facebook Indonesia dikarenakan Facebook memblokir akun media sosial mereka dengan alasan yang dinilai diskriminatif dan aksi lainnya yang muncul kepermukaan publik.[9]

Kegiatan FPI yang sering menimbulkan kontroversi di media massa juga mendapat dukungan dari kalangan lain, seperti Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa ormas FPI bukan gerakan Islam radikal yang ingin mendirikan negara Islam, tetapi misinya ingin menjalankan *"amar ma'ruf nahi munkar*"(menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan). "Sayangnya apa yang dilakukan tidak terkoordinasi dengan aparat keamanan. Jadinya merusak citra Islam yang damai "hal ini disampaikan di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/8/2016.)[10]

Pada awalnya FPI hanya berada di Jakarta , seiring berjalannya waktu simpatisan FPI semakin banyak dan mendirikan FPI di daerah-daerah. FPI masuk ke Sumatera Barat tahun 2000-an, ketika seorang Buya yang tidak diketahui namanya yaitu seorang pimpinan Pondok Pesantren Tawalib Padang Panjang membawa surat mandat dari Habieb Rizieq untuk membentuk FPI di Sumatera Barat, buya tersebut menunjuk Ustadz Radison. Pada saat itu keberadaan FPI tidak bertahan lama.[11]

---

[9]Rubaidi, *Variasi Gerakan Radikal di Indonesia*, Analisis Vol XI,no 1, Juni 2011, h. 44

[10]Http://www.liputan6.com.html&ic.id- diakses tanggal 14 April 2018 pukul 19.30

[11]http://www.fpisumbar.com/2017/11tentang-kami.html&lc=id- diakses tanggal 21 November 2017 pukul 20.00

Pada 15 Januari 2011 DPP FPI memberikan surat mandat untuk pembentukan pengurus FPI di Sumatera Barat. Dan pada tanggal 14 September 2012 DPD FPI Sumatera Barat di SK kan oleh Al Habib Muhammad Rizieq Shihab, LC, MA dengan menunjuk Ustadz Busra sebagai ketua, Fitra Yadi sebagai sekretaris dan Yustanur sebagai Bendahara.[12]

Dewan Pimpinan Wilayah Bukittinggi terbentuk tahun 2013 dengan SK DPD Sumatera Barat. Pada tanggal 23 April 2018 telah diadakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Bukittinggi dengan terpilihnya Inyiak Yustanur sebagai Ketua Dewan Tanfidzi.[13]

Mengenai struktural DPW Bukittinggi 2018/2023 sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan tanfidzi terpilih belum bisa disampaikan kepada penulis dikarenakan harus menunggu SK dari DPP FPI dan mengenai jumlah anggota DPW Bukittinggi sekarang sekitar berjumlah 150. [14]

Dari informasi yang penulis dapatkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FPI Bukittinggi seperti aksi sosial pengumpulan dana bencana alam, tablig akbar, sunatan massa, kegiatan bakti sosial, aksi *sweeping* pada malam tahun baru dan menurut penuturan Inyiak Yustanur kegiatan FPI menyangkut segala yang berhubungan dengan kegiatan sosial.[15]

Gerakan Politik FPI memang tidak beralifiasi terhadap salah satu kekuatan

[12]http://www.fpisumbar.com/2017/11tentang-kami.html&lc=id- diakses tanggal 21 November 2017 pukul 20.00

[13] Hasil wawancara Inyiak Yustanur, selaku Ketua Dewan Tanfidzi DPW Bukittinggi pada 14 April 2018 di Sekre DPW FPI Bukittinggi

[14] Hasil wawancara Inyiak Yustanur, selaku Ketua Dewan Tanfidzi DPW Bukittinggi pada 14 April 2018 di Sekre DPW FPI Bukittinggi

[15] Hasil wawancara Inyiak Yustanur, selaku Ketua Dewan Tanfidzi DPW Bukittinggi pada 14 April 2018 di Sekre DPW FPI Bukittinggi

politik tertentu. Dalam menghadapi pemilu 7 Juni 1999, misalnya FPI menyatakan sikap netral terarah. Netral tidak berkampanye untuk satu partai tertentu, sedangkan terarah FPI hanya mendukung partai Islam yang memperjuangkan hak Allah dan hak-hak makhluk- Nya dengan menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dengan ungkapan lain, penegakkan moral dan agama merupakan kegiatan FPI yang utama.[16]

Pada Pemilu tahun 2014 yang lalu FPI menyatakan pandangan dan sikap sebagai pencerahan bagi umat Islam di Indonesia yaitu kepada umat Islam yang akan menjadi pemilih dalam Pemilu 2014 yang akan datang, agar TIDAK menjadi korban penipuan kaum sekuleris dan liberalis maupun parpol sekuler lainnya, maka umat Islam yang berkehendak menggunakan hak memilihnya, dianjurkan memilih calon calon anggota legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD kota/kabupaten) yang memiliki komitmen penengakkan syariat Islam dari Parpol yang secara tegas berazaskan Islam dan memiliki keberpihakan terhadap umat Islam.

Pada penelitian yang dilakukan Al-Zastrouw terhadap gerakan FPI dijelaskan bahwa dalam gerakan ini, Islam hanya berfungsi sebagai alat legitimasi gerakan politik. Sebab, pada hakikatnya gerakan ini hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari suatu kesatuan kekuatan politik yang sebenarnya tidak memiliki spirit keagamaan. Di sini penggunaan simbol, bahasa dan tokoh Islam hanya sebagai bungkus untuk menutupi kepentingan politik yang sedang

[16]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*,..., h. 136-137

dimainkan.[17]

FPI yang dikenal sebagai Islam radikal yang di mana kelompok ini memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatic yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung dan menggantinya dengan Syariat Islam. Dalam kegiatan mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka dan seringkali bergerak secara bergeriliya.[18]

Sifat keras yang melekat pada kelompok ini berasal dari keinginan mereka untuk menjalankan agama Islam secara mendasar yang tercermin dalam keinginan kelompok ini untuk menjalakan syariat Islam secara keseluruhan. Dan dengan pemahaman politik FPI yang tidak berafiliasi terhadap suatu partai politik menunjukkan bahwa kegiatan utama FPI adalah penegakkan moral dan agama.

Dengan melihat penjelasan diatas penulis berasumsi bahwa pemahaman FPI tersebut juga berpengaruh terhadap FPI di Bukittinggi, dari itulah penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **"FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) BUKITTINGGI (STUDI GERAKAN dan PANDANGAN POLITIK)".**

B. Rumusan Masalah

Bertolak belakang dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah:

---

[17]Al- Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LkiS,2006) h.267

[18]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*..., h. 10

1. Bagaimana bentuk gerakan Front Pembela Islam Bukittinggi ?
2. Bagaimana pandangan Politik Front Pembela Islam Bukittinggi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bentuk gerakan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam Bukittinggi
   b. Untuk mengetahui pandangan politik dari Front Pembela Islam Bukitttinggi
2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana S 1 pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
   b. Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu landasan kepustakaan bagi peneliti-peneliti yang berkaitan dengan masalah ini

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa peneliti yang telah membahas terkait dengan masalah gerakan radikal ini diantaranya penelitian yang dilakukan M. Muji Buddin SM (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) dengan judul " Tindakan dan Varian dan Radikalisme Front Pembela Islam (FPI) Mojekerto. Dari penelitian ini disimpulkan FPI Mojokerto layak disebut gerakan

radikal, karena organisasi ini tidak menaati peraturan yang berlaku, meski FPI bekerja sama dengan warga dan aparat akan tetapi cara kekerasan yang dilakukan bertentangan dengan pereturan yang ada.

Kemudian penelitian yang dilakukanan Ari Febriansyah Ismail (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2016) dengan judul Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar . Dari penelitian ini disimpulkan FPI yang didirikan di Makassar memang di desain sebagai organisasi keagamaan, tetapi FPI juga dapat bertindak sebagai organisasi politik. Dalam teori gerakan sosial menyebutnya gerakan reformasi. Motif untuk memperjuangkan syari'at Islam adalah langkah yang sah, sedangkan aksi untuk memperjuangkannya diupayakan untuk tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan olehNajiullah (Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016) dengan judul Pengaruh Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) Cabang Kasemen terhadap Persepsi Masyarakat di Kecamatan Kasemen tahun 2016. Dari penelitian ini disimpulkan persepsi masyarakat Kasemen terhadap Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar FPI dapat dikategorikan baik.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul Gerakan Radikal di Indonesia (Studi terhadap Front Pembela Islam Bukittinggi), maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul

tersebut:

Front Pembela Islam : organisasi atau gerakan pembela Islam yang dideklarasikan di Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih pada 17 Agustus 1998 yang dipimpin oleh Habib Muhammad Rizieq Shihab.[19]

Gerakan : pergerakan, usaha, atau kegiatan di lapangan sosial (politik dsb)[20]

Pandangan : pengetahuan (arti apa-apa yang diketahui): pendapat[21]

Politik : pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)[22]

Bukittinggi : nama kota atau setingkat kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat

Jadi maksud dari keseluruhan judul ini adalah studi tentang Front Pembela Islam mengenai gerakan yang dilakukan oleh organisasi massa islam yang terdapat di Bukittinggi.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian adalah mengemukakan

[19]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*..., h 130

[20]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.443

[21]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1010

[22]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1050

secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan metode dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah ini[23]dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha memahami tentang realitas sosial[24].

2. Latar Penelitian

Adapun tempat penelitian adalah di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi duas umber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memua informasi atau data tersebut.[25]Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari informan

[23]Husain Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet Ke 1, h. 53

[24]Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu,* (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Ed. I, Cet. Ke-2, hal. 102

[25]Tatang M. Amirin, *Menyusun RencanaPenelitian,* (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 1995), Cet. Ke-3, hal. 132

yang terkait dengan pokok utama permasalahan skripsi ini.Informan dalam penelitian ini adalah pengurus FPI Bukittinggi dan anggota.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi dan data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti data yang diperolehdaridokumen-dokumen resm iatau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan indera. Dalam rumusan lain observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.[26]

Dalam hal ini, penulis akan terjun langsung ke DPW FPI Bukittinggi yang beralamat di Anak Aia, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

[26]Husain Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*..., h.54

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya. Dalam penelitian ini dokumen yang dipakai yaitu AD/ART FPI, foto SK Kepengurusan DPW FPI Bukittinggi tahun 2018-2023.

5. Teknik Analisa Data

Adapun untuk teknik analisa data yang peneliti gunakan ialah model Miles dan Huberman. Terdapat tiga tahapan dalam analisa Miles dan Huberman. Terdapat tiga tahapan:

a. Tahap reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan
b. Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
c. menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penulis di dalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai pada kesimpulan khusus.

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih lanjut dan memudahkan pemahaman pembaca dan agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi kepada IV bab dan pada tiap-tiap bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitia, Tinjauan Kepustakaan, Penjelasan Judul, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Gerakan Islam di Indonesia, meliputi Gerakan Islam di Indonesia dengan subbab pengertian gerakan Islam dan macam-macam gerakan Islam dan Pandangan Politik Islam Modren di Indonesia dengan subbab tipologi hubungan organik dan bentuk pemerintahan teo-demokrasi, tipologi sekuler dalam pemikiran politik modren dan tipologi moderat dab bentuk pemerintahan ideal dalam pemikiran Islam modren.

BAB IIIGambaran Umum Front Pembela Islam Bukittinggi meliputi latar belakang berdirinya, visi dan misi DPW FPI Bukittinggi, format kepemimpinan, struktural dan kekuasaan dalam FPI, aksi-aksi FPI Bukittinggi dan prosedur standar FPI, pandangan politik FPI.

BAB IV Gerakan dan Pandangan Politik FPI Bukittinggi meliputi gerakan, pandangan politik dan analisa penulis terhadapgerakan dan pandangan politik FPI Bukittinggi

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

GERAKAN DAN PANDANGAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Gerakan Islam di Indonesia

1. Pengertian Gerakan Islam

Gerakan Islam adalah sebuah aktifitas masyarakat yang tumbuh atas dasar kebangkitan jiwa dan kepuasan diri yang penuh harapan dan keyakinan akan sesuatu dari Allah SWT bukan dari manusia. Kebangkitan jiwa itu pada dasarnya adalah sebuah ketegangan yang dirasakan oleh seorang muslim ketika ia disentuh oleh pelencengan, sehingga kalbunya bergetar sebagai akibat dari kontradiksi yang terjadi antara imannya di satu sisi dengan realitas umatnya di sisi lain.[1]

Di Indonesia perkembangan gerakan Islam di mulai tahun 1980-an yang ditandai dengan munculnya fenomena menguatnya religiusitas umat Islam dan juga munculnya aktor gerakan Islam baru. Kelompok-kelompok Tarbiyah(yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad dan sebagainya, merupakan representasi arus gerakan Islam di Indonesia.[2]

Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skipturalis, konservatif dan ekslusif. Berbagai ormas baru tersebut pada umumnya memiliki kesamaan visi yakni pembentukan "Negara Islam" dan mewujudkan penerapan syariat Islam, baik dalam wilayah masyarakat maupun

[1]Novi Hendri, *Sejarah Pergerakan Islam Di Indonesia*, (t.tt: Hayfa Press, 2004), h.49-50
[2]M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h.xi

negara.[3]

2. Macam-macam Gerakan Islam

Islam,sebagai agama *samawî* yang memiliki kitab suci Al- Qur'an dalam dinamika sejarahnya, mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Singkatnya, setiap umat Islam (intelektual Muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan munculnya keragaman gerakan dalam Islam yang bersifat integralistik antara Islam dan negara. Meskipun gerakan ini cukup luas tapi secara ideologi kelompok ini menganut paham salafi radikal.[4]

Secara umum gerakan Islam di Indonesia terbagi atas Fundamentalisme, Liberal dan Moderat.

1. Fundamentalisme

Secara etimologi fundamentalisme berasal dari kata fundamental yang berarti hal-hal yang mendasar atau asas-asas. Sebagai sebuah gerakan keagamaan, fundamentalisme dipahami sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang memiliki doktrin untuk kembali kepada ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam kitab suci. Ciri-ciri gerakan fundamentalisme yaitu: (1) cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku), literalis (tekstual), absolut, dan dogmatis; (2) cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir agama (menganggap dirinya sebagai pemegang otoritas tafsir agama yang paling absah). Akibatnya, mereka menganggap sesat kelompok lain

[3]M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam*,.., h.xi

[4]Rahmat, M Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,tt)h.153

yang tidak sealiran; menganggap dirinya sabagai orang-orang yang benar-benar percaya terhadap agama, sementara di luarnya tidak percaya atau percaya setengah hati; (3) meyakini kesatuan agama dan negara, di mana agama harus mengatur negara; (4) terutama di dunia Timur, memiliki pandangan yang stigmatis terhadap barat; (5) mendeklarasikan perang terhadap paham dan tindakan sekuler, yang karena program utamanya antara lain kontrol seksual; (6) sebagian cenderung radikal (menggunakan cara kekerasan) dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya.[5]

Di Indonesia, fundamentalisme Islam, terutama pasca runtuhnya Orde Baru, bisa dilihat dari fenomena Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Muhajidin Indonesia (MMI). Ketiganya memiliki persamaan agenda yang mengklaim tengah berjuang untuk menegakkan syari'ah tradisional Islam secara literal sebagai *manjaj salaf.*

Radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar, pangkal dan bagian bawah, atau bisa juga secara menyeluruh habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Secara terminologi radikalisme merupakan aliran atau paham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suau negara secara keras.[6] Menurut Sartono Kartodirjo, kata radikal digunakan sebagai indikator sikap penolakan terhadap seluruh kondisi yang sedang berlangsung.[7]

---

[5] Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013)h. 251

[6]Eka Yani Arfina, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan EYD dan Singkatan Umum*, (Surabaya: Tiga Dua,tt)

[7]Tarmizi Taher...[et.al], *Radikalisme Agama;* editor, Bahtiar Efendy, Hendro Prasetyo.—(Jakarta: PPIM,1998) h.xvi

Menurut Horace M. Kallen, radikalisme sosial memiliki ciri-ciri, *pertama*, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikalis akan kebenaran program atau ideologi mereka.[8]

Makna radikalisme dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagaamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagaamaan yang dianut dan diyakininya.[9]

Secara sederhana kemunculan gerakan radikal di Indonesia disebabkan setidaknya dua hal. *Pertama*, betapapun bibit gerakan Islam radikal mulai bersemi setelah masa kemerdekaan yang ditandai dengan munculnya gerakan darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan Islam radikal kontemporer secara organisatoris dapat dinyatakan mulai muncul kembali pada akhir 1970-an dan mendapatkan momen sejak pecahnya revolusi Islam Iran. *Kedua*, sebagaimana kelompok sosial politik lain, muncul ke permukaan pada masa reformasi ketika pintu gerbang kebebasan menyampaikan pendapat dan berasosiasi dibuka. Sebagimana diketahui, pada masa sebelumnya, rezim orde baru sama sekali tidak

[8]Tarmizi Taher, *Radikalisme Agama,...*,h.xviii

[9]Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press,2002) h.5

memberikan ruang begi kelompok-kelompok sosial maupun agama untuk bebas menyuarakan aspirasi mereka.[10]

Karakteristik sebuah kelompok layak disebut sebagai Islam Radikal:

Pertama, mereka sering menunjukkan mentalitas perang salib. Dalam konteks sekerang, hegemoni dunia barat, khususnya Amerika Serikat, terhadap bangsa-bangsa lain sering dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan baru. (neo-colonialism). Sementara itu, ide-ide mengenai adanya konspirasi dunia barat, termasuk di dalamnya gerakan Zionisme Yahudi yang menentang Islam dan dunia Islam tetap berkembang dalam kelompok ini.

Kedua, adanya penegakkan hukum Islam yang juga kerap diupayakan dengan keras oleh kalangan revivalis dan fundamentalisme muslim tidak lagi dianggap sebagi sebuah jalan alternatif melainkan sudah menjadi suatu keharusan. Dengan kata lain, tidak ada lagi jalan yang sah di dalam membentuk sebuah komunitas Muslim yang benar-benar tunduk kepada Tuhan melainkan dengan jalan menjadikan Islam sebagai landasan bagi segalamya, termasuk di dalamnya agama dan sosial dan politik.

Ketiga, terdapat kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut sistem-sistemnya yang mapan tapi dianggap tidak sah, khususnya karena kurangnya perhatian terhadap penyakit sosial masyarakat yang mereka identifikasi sebagai maksiat dan kemungkaran. Mereka percaya bahwa mereka mampu menanggulangi dan memerengi penyakit sosial itu sendiri dan tentu saja dengan cara-cara mereka sendiri tanpa mengindahkan ruang publik

[10]Jahroni Jajang, Jamhari, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.6-8

yang menjadi milik masyarakat luas. Dalam kontek Indonesia dewasa ini, hal ini dengan jelas terlihat pada gerakan FrontPembela Islam (FPI).

Keempat, semangat untuk menegakkan agama sebagai lambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan di dunia dengan alan jihad dengan sendirinya mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Bahkan, melakukan jihad dengan segenap aspeknya melawan kebatilan, kemungkaran dan musuh-musuh yang membenci Islam yang mereka yakini merupakan sebuah tugas keagamaan yang suci. Bahkan, terdapat kesan yang kuat bahwa jihad lebih dimaknai sebuah usaha fisik untuk memerangi musuh-musuh Islam.[11]

Istilah fundamentalisme dan radikalisme sering dipahami sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial dan keagaaman. Dikarenakan fundamentalisme lebih merupakan sebuah keyakinan untuk kembali pada fondasi dan dasar-dasar agama. Hal yang sama juga melekat pada istilah radikalisme. Makna negatif dari pandangan fundamentalis adalah sikap kekerasan dan anarkis. Penyandingan kekerasan dengan radikalisme disebabkan, gejala dalam realitas sosial yang sering nampak. Radikalisme tidak semata-mata pada gerakan atau aksi, tetapi ia dapat pula dalam bentuk suatu ideologi. Dalam konteks tertentu, dapat disebutkan bahwa fundamentalisme merupakan spirit pemikiran dan gerakan bagi radikalisme agama.

2. Islam Moderat

Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok kelompok agama yang berbeda. Inilah watak *rah*

[11]Jahroni Jajang, Jamhari, Gerakan Salafi Radikal,..., h. 6-8

mah bagi Islam moderat Indonesia, yang lebih bermakna teologis, dari pada politis yang sering diwacanakan oleh Amerika Serikat ketika memaknai Islam moderat.[12]

Muslim moderat adalah mereka yang berdiri di antara dua ekstrimitas yang saling berhadapan, tidak memihak pada salah satu kubu dan berada di garis atau "jalan ketiga" dengan menawarkan solusi yang komprehensif, seimbang dan adil. [13]

Dengan ini, Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal (*tawassut*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama; toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam al-Qur'ân atau Sunnah. Contoh kelompok modernis seperti Muhammadiyah.[14]

3. Islam Liberal

Kata liberal adalah satu istilah asing yang diambil dari kata Liberalism dalam bahasa Inggris dan liberalisme dalam bahasa Prancis yang berarti kebebasan, jadi secara singkat Islam liberal adalah Islam yang bebas.[15] Menurut Kurzman mendefenisiskan Islam Liberal dengan empat agenda. Dalam pandangan

---

[12]Toto Suharto, *Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 9, No.1, September 2014, h.89

[13]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Ahkam*, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 185

[14]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Ahkam,* Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 183

[15] Tamamblog: *Islam Liberal dalam kajian Islam* http: islam-liberal-dalam-kajian-islam diaksese pada tanggal 1 September 2018 pukul 20.00

Islam liberal ditandai dengan beberapa agenda yaitu pluralisme, demokratisasi dan sekularisasi, feminisme dan kesetaraan gender, serta re-interpretasi fiqh (syari'ah) dengan interpretasi yang liberal. Di Indonesia Islam Liberal bermula tahun 2001. Tetapi ide-ide Islam liberal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970 dengan munculnya ide sekularisasi dan modernis Islam.

Ciri-ciri pemikiran Islam liberal menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas:[16]

a. Kebergantungan semata-mata kepada akal manusia bagi memandu kehidupan dunia
b. Dualisme dalam memahami berbagai realiti dan kebenaran
c. Penekanan kepada unsur-unsur perubahan dalam kewujudan yang mempamerkan pandangan alam sekuler
d. Doktrin humanisme yaitu jelmaan ideologi sekulerisme yang memusatkan penilaian segala-galanya kepada fikiran manusia.
e. Konsep tragedi yang menyusup dalam setiap arena kehidupan baik falsafah agama dan kesenian.

Beberapa tokoh juga memetakan macam-macam gerakan Islam sesuai dengan pemikirannya terhadap islam, seperti Fazlur Rahman Malik salah satu pemikir neomodernis. Fazlur Rahman mengelompokkan gerakan pembaharuan Islam pada empat bentuk, yaitu: Revivalis pra-Modernis, Modernisme Klasik,

[16]Tamamblog: *Islam Liberal dalam kajian Islam* http: islam-liberal-dalam-kajian-islam diaksese pada tanggal 1 September 2018 pukul 20.00

Neo-Revivalisme dan Neo Modernisme.[17]

Menurut Rahman, kelompok pertama muncul pada abad ke-18 dan diwakili antara lain oleh Wahabiyyah di Saudi Arabia dan Sanusiyyah di Afrika Utara. Tema gerakan mereka adalah: (1) prihatin terhadap kemerosotan umat Islam, (2) kembali pada Islam yang orisinil dan membuang takhyul, bid'ah dan khufarat, (3) reinterprestasi terhadap konsep takdir yang salah selama ini, (4) perlawanan bersenjata, jika diperlukan.[18]

Kemudian pada abad ke-19 muncullah gerakan modernisme klasik yang diwakili antara lain oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad 'Abduh. Perhatian khusus dari gerakan ini adalah perluasan tentang ijtihad terhadap masalah-masalah vital yang dihadapi umat Islam. Disamping itu, modernisme klasik juga mulai terbuka terhadap gagasan-gagasan barat.[19]

Gerakan kedua ini kemudian diambil alih oleh gerakan neo-revivalisme yang hampir mirip dengan gerakan pertama. Perhatian utama gerakan ini adalah keharaman bunga bank, family planning (keluarga berencana) dan tidak menutup aurat adalah dosa besar. Slogan mereka adalah bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Gerakan ini diwakili oleh Al- Maududi, Khadafi, dan Imam Khumayni.[20]

Selanjutnya pada awal abad ke-20 muncul gerakan neo-modernis yang dipelopori oleh Fazlur Rahman. Rahman merumuskan metodenya yaitu

---

[17]Fazlur Rahman, *Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa ini*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (penyunting), Perkembangan Modern dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h.20

[18]Fazlur Rahman, *Gerakan Pembaruan dalam Islam...*, h.26

[19]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 175

[20]Fazlur Rahman, Gerakan Pembaruan dalam Islam..., h.23

pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur'an, perbedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an, dan pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur'an dengan sepenuhnya memperhatikan latar belakang sosiologisnya.

Rahman denga klaim neo-modernismenya telah merumuskan suatu teori hukum yang disebut sebagai the double movement theory, yakni dari yang khusus ke yang umum dan sebaliknya. Gerakan pertama, memahami situasi dan problem historis dimana wahyu diturunkan, kemudian dicarikan rasio-legis. Gerakan kedua, mengeneralisasikan dan mensistemasikan prinsip-prinsip umum dari gerakan pertama untuk kemudian dihadapkan pada realitas aktual dewasa. Dapat dikatakan gerakan neo-modernis memiliki concern pada tradisi dan berusaha membangun visi Islam di masa moderen dengan tidak meninggalkan warisan khazanah intelektual Islam. Bahkan jika mungkin, mereka mencari akar-akar Islam untuk mendapatkan kemoderenan itu sendiri. Sedangkan kaum modernis lama lebih banyak bersifat apologetik terhadap modernitas.[21]

Di Indonesia terdapat tokoh intelektual neomodernisme yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Gerakan pembaharuan pemikiran Islam secara umum ditandai dengan pemikiran-pemikiran kritis terhadap modernisasi. Hasilnya berupa tawaran alternatif-alternatif non-barat dalam membangun dan membangkitkan umat Islam dari ketertinggalan.[22]

Gerakan Neomodernisme berkembang pada awal 1970, terutama di kalangan mahasiswa yang berlatar belakang tradisional. Komunitas mahasiswa ini

[21]Fazlur Rahman, *Gerakan Pembaharuan dalam Islam*..,h. 52

memiliki akses pada pendidikan tinggi dengan takaran yang signifikan berkat ekspansi pendidikan yang berlangsung pasca kolonial di Indonesia. Untuk memperluas wawasan keilmuannya, di antara mereka terlibat di puncak organisasi mahasiswa yang berorientasi modern yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).[23]

Gerakan Cak Nur di kancah pemikiran dimulai saat dia memimpin HMI pada tahun 1970 dengan meneriakkan Islam Yes! Parta Islam no!. Idenya ini menekankan bahwa Islam tidak memiliki gagasan tentang negara Islam, ide-ide pembentukan negara Islam di era modern tak lebih dari respon apologis terhadap barat, bukan hasil interprestasi rasional terhadap ajaran Islam. baginya, tidak bijak kalau kita beraktivitas di parpol dengan menjauhi pelayanan sosial. Jadi, perjuangan Islam bisa lewat jalur non-politik.[24]

Dalam pemikiran sisi intelektual Gus Dur, terdapat dua gagasan yang diwacanakannya. *Pertama*, Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosio kultural dan politik Indonesia. *Kedua*, gagasan pribumisasi Islam. dimensi pertama dari gagasan Gus Dur ini merupakan seruan kepada rekan-rekannya sesama muslim untuk tidak menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap konstitusi negara Indonesia yang sudah ada sekarang.

Gus Dur dalam berbagai forum gencar menyampaikan kritik terhadap gaya otoritarianisme pemerintahan Predisen Soeharto dan memberikan statmen secara terbuka tentang perlunya reformasi kehidupan demokrasi. Kehadiran Gus Dur di NU telah menoreskan berbagai prestasi besar khususnya di bidang pemikiran.

---

[23]M.Wahid Nur Tualeka, *Gerakan Neomodernisme Islam di Indonesia (Perpektif Cak Nur dan Gus dur)*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama/Vol. 1. No. 1, 2015 ,h. 6

[24]M.Wahid Nur Tualeka, *Gerakan Neomodernisme Islam di Indonesia (Perpektif Cak Nur dan Gus dur)*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama/Vol. 1. No. 1, 2015 ,h. 8

Neomodernisme di Indonesia seperti tercermin dalam pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memiliki beberapa karakteristik.*Pertama*, ia berwatak progresif. Hal ini diindikasikan dengan penekanan sikap positif terhadap pentingnya modernitas, kemajuan, dan pengembangan. Ia sangat kritis dalam memperhatikan masalah-masalah keadilan sosial, disertai rasa optimis tentang arah mana manusia bergerak maju.

Kedua, neomodernisme seperti halnya fundalisme adalah respon terhadap modernitas, gangguan globalisasi peradaban, dan kebudayaan barat terhadap dunia Islam. Neomodernis tidak merasa perlu menekankan perbedaan dengan barat atau tidak menekankan identitas diri yang terpisah dan menekankan bahwa ide-ide Islam memberi warisan umum terhadap barat.

Ketiga, pemikiran neomodernisme Indonesia menganjurkan jenis sekularisme khusus yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Indonesia, sehingga keinginan sektarianisme keagamaan tetap terpisah dari keinginan negara atau ada keterpisahan agama dengan negara. Nurcholis Madjid pernah melontarkan ide kontroversional sekularisasi dan desakralisme. Sekularisasi adalah usaha untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

Keempat, neomodernisme menghadirkan sebuah keterbukaan, inklusivitas, dan pemahaman liberal Islam yang dapat diterima oleh segala kalangan, pengakuan pluralisme sosial, penekanan perlunya toleransi, dan hubungan harmonis di kalangan masyarakat. Kelima, neomodernisme adalah gerakan

kembali pada dasar-dasar modernisme dan menyitesiskan pemikiran kaum tradisionalis, modernis dan tuntutan barat.[25]

Delian Noer mengklasifikasikan kelompok muslim menjadi dua, yaitu kelompok Tradisionalis dan Moderat.[26]

4. Islam Tradisional

Tradisionalis adalah kelompok pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Kelompok ini menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai dibicarakan secara tuntas di tangan para pendahulu. Meskidemikian, mereka tidak sama dengan kaum fundamentalis yang sama sekali menolak modernitas dan membatasi dirihanya kepada *Khulafâal-Râsyidîn* yang empat. Sementara kaum tradisionalis justru melebarkan sayapnya kepada *salaf al-shâlih* yang tidak menolak pencapaia nmodernitas.[27]

Karena apa yang dihasilkan modernitas, ilmu dan teknologi,bagi mereka, tidak lebih dariapa yang pernah dicapai pada kejayaan Islam dahulu. Walaupun demikian, mereka masih mau mengadopsi peradaban luar, tetapi dengan syarat semua itu harus diislamkan lebih dahulu. Kecenderungan ini tampak dariupaya mereka melakukan islamisasi segala aspek kehidupan, termasuk islamisasi ilmu pengetahuan, sebagaimana yang diusung oleh Naquib al-Atas.Menurut al-Atas, islamisasi ilmu berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang

[25]M.Wahid Nur Tualeka, *Gerakan Neomodernisme Islam di Indonesia (Perpektif Cak Nur dan Gus dur)*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama/Vol. 1. No. 1, 2015 ,h. 18

[26]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 178

[27]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 179

didasarkanpadaideologisekulerdandarimaknamaknasertaungkapan-ungkapanmanusiasekuler[28].

Kelompok tradisonalis direpresentasikan oleh HuseinNasr, Muthahhari, Naquib al-Atas dan Ismail al-Faruqi. Di tanah air, kecenderungan polapikir sepert iini tampak dalam tradisi pesantren. *Turâts* di kalangan pesantren tidak hanya dinilai sebagai sesuatu yang harus dikuti dan ditampilkan kembali dalam kehidupan modern,tetapi telah dianggap sebagai sesuatu yang sempurna. Contoh kelompok tradisionalis di Indonesia seperti Nahdatul Ulama (NU).[29]

5. Islam Moderat

Islam moderatadalahmereka yang memilikisikaptoleran, rukundankooperatifdengankelompokkelompok agama yang berbeda.Inilah watak *rahmah* bagi Islam moderat Indonesia, yang lebih bermakna teologis, dari pada politis yang sering diwacanakan oleh Amerika Serikatketika memaknai Islam moderat.[30]

Muslim moderat adalah mereka yang berdiri di antara dua ekstrimitas yang saling berhadapan, tidak memihak pada salah satu kubu dan berada di garis atau "jalanketiga" dengan menawarkan solusi yang komprehensif, seimbang dan adil. [31]

---

[28]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 178

[29]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 183

[30]Toto Suharto, *Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 9, No.1, September 2014, h.89

[31]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Ahkam*, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 185

Dengan ini, Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal (*tawassut*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama; toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam al-Qur'ân atau Sunnah. Contoh kelompok modernis seperti Muhammadiyah.[32]

Seorang peneliti Fahmina Institute Cirebon Marzuki Wahid menyatakan, gerakan Islam di Indonesia memiliki karakter dan ragam yang khas, baik dari segi gerakan maupun pemikiran. Konflik, ketegangan, pertikaian, dialog, maupun harmonisasi di antara mereka merupakan bagian dari keragaman itu.[33]

Secara umum, menurut Marzuki, gerakan-gerakan itu dapat dipilah menjadi dua kategori makro: *Islam izzul Islam wal muslimin* (menjunjung tinggi kemuliaan Islam dan umat Islam) dan *Islam rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi dunia). Bagi kelompok pertama, Islam diturunkan untuk meluhurkan martabat Islam dan kaum muslim saja. Termasuk kelompok ni adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbur Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini menurut Marzuki memiliki pandangan yang ekslusif.[34]

---

[32]Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Ahkam*, Vol XIV, No.2, Juli 2004, h. 183

[33]http://www.academia.edu/31367740/Muslim_Moderat_Pemetaan_Ideol_Ogo_Organisasi_Massa_Islam_di Indonesia di akses tanggal 20 juli 2018 jam 20.00

[34]http://www.academia.edu/31367740/Muslim_Moderat_Pemetaan_Ideol_Ogo_Organisasi_Massa_Islam_di Indonesia di akses tanggal 20 juli 2018 jam 20.00

Sedangkan kelompok kedua, adalah kelompok Islam inklusif. Termasuk di dalamnya kata Marzuki adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, al-Khairat, al-Washilah dan sebagainya.Perbedaan yang mendasar dari dua kelompok tersebut menurut Marzuki,[35]*pertama,* dari sisi pemahaman terhadp kitab suci. Kelompok pertama memandang Al-Qur'an dan Sunnah hanya untuk umat Islam belaka. Sedangkan kelompok kedua memandang Al-Qur'an dan Sunnah untuk semua, tidak terbatas pada umat Islam saja, dan terbuka untuk dibaca siapapun. Kelompok pertama lebih mengutamakan teks ketimbang makna, sedangkan kelompok kedua lebih mengutamakan konteks ketimbang teks.

Kedua, soal kebudayaan lokal. Kelompok pertama menolak kebudayaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan kelompok kedua memandang Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber agama Islam lebih besar dari sekedar teks al-Qur'an dan Sunnah. Kita bisa menggunakan sejarah, alam dan sebagainya untuk merumuskan ajaran-ajaran Islam.

Ketiga, pandangan politik. Kelompok pertama mengidealisasikan Piagam Madina sebagai prototype negara Islam. inilah yang memunculkan agenda khilafah. Sedangkan kelompok kedua memandang Piagam Madina hanya kreatifitas dan eksperimen politik Nabi Muhammad saat itu, untuk menyelesaikan problem di Madina. Piagam ini tidak mengikat umat Islam saat ini.

Fenomena keberagaman gerakan sosial Islam di era kontemporer telah mewarnai berbagai aktivitas dan dakwah dalam pergerakan Islam. Salah satu yang

[35]http://www.academia.edu/31367740/Muslim_Moderat_Pemetaan_Ideol_Ogo_Organisasi_Massa_Islam_di Indonesia di akses tanggal 20 juli 2018 jam 20.00

menarik dalam kajian ini yaitu munculnya gerakan Islam global atau disebut dengan Gerakan Islam Transnasional.

Gerakan Islam transnasional adalah sebuah istilah yang ditunjukan kepada organisasi Islam yang bergerak lintas negara, dimana pergerakannya melewati batas-batas teritorial setiap negara. Gerakan organisasi ini berorientasi pada agenda penyatuan umat Islam di seluruh dunia, dimana ideologi keislamannya didominasi oleh pemikiran skripturalis, tekstual, normatif, radikal, fundamnetalis, dimana gagasannya berbeda dengan konsep negara bangsa.[36]

Secara khusus di Indonesia, istilah transnasional pertama kali disampaikan pada tahun 2007 oleh KH Hasyim Muzadi, seorang ulama besar dan manatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang sengaja diimpor dari luar dan berkembang di Indonesia.

Sumber lain menyebutkan bahwa istilah Islam transnasional dikemukakan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif mantan ketua umum Muhammmadiyah. Ma'arif menyebutkan secara spesifik kepada HTI sebagai gerakan politik transnasional, ia menyoroti tentang HTI bahwa HTI berbeda dengan MMI yang bercorak Indonesia, HTI adalah gerakan politik Islam transnasional yang digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani.

Studi Fealy dan Bubalo selanjutnya menyebut ada tiga arus utama gerakan Islamisme yang ada di tanah air. *Pertama*, Ikhwanul Muslimin yang diadopsi gerakan tarbiyah dan mulai berkembang di perguruan tinggi di akhir tahun 1980-

[36]Aksa, *Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia*, Jurnal Yupa: Historical Studies., Tahun Pertama, No1, Januari 2017,h.3

an. Gerakan kelompok ini berkembang underground di bawah tekanan rezim soeharto. Konsolidasi ini menemukan momentumnya ketika rezim Soeharto berakhir. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang berdiri pada April 1998, sebagian pemimpinnya kemudian mendirikan Parta Keadilan Sejahtera (waktu itu bernama Partai Keadilan).[37]

Kedua, kelompok salafi. Kelompok ini sebagia besar berbasis lembaga dakwah dan pendidikan. Misalnya yayasan al-Sofwah, Yayasan Ihsa at-Turost, dan al-Haramain al-Khoiriyah. Gerakan salafi yang cukup fenomenal adalah Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Waljamaah (FKAW) yanh melahirkan Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Tholib. FKAW berdiri tahun 1998 dan dibubarkan pada bulan Oktober 2002.

Ketiga, kelompok jihadis. Kelompok ini adalah kelompok yang paling ekstrem dari gerakan islamisme yang mengesahkan kekerasan seperti bom bunuh diri. Selain itu, ada juga kelompok yang didirikan pada 1 Januari 1993 oleh Abdullah Sungkar termasuk kelompok jihadi.[38]

Dari beberapa macam pemikiran Islam yang berkembang di indonesia telah ikut mempengaruhi kelompok gerakan keislaman di Indonesia. Jalur-jalur yang digunakannya melalui jalur gerakan sosial, jalur dakwah dan dunia pendidikan serta jalur media dan publikasi. Dengan demikian, kehadirannya memberikan warna dan tantangan tersendiri bagi gerakan Islam, khususnya di Indonesia.

---

[37]Aksa, *Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia*, Jurnal Yupa: Historical Studies., Tahun Pertama, No1, Januari 2017,h.12

[38]Aksa, *Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia*, Jurnal Yupa: Historical Studies., Tahun Pertama, No1, Januari 2017,h.13

B. Pemikiran Politik Islam Modern

1. Tipologi Hubungan Organik dan Bentuk Pemerintahan Teo-Demokrasi

Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*din wa daulah*). Ia merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara betul-betul organik di mana negara berdasarkan syari'ah Islam dengan ulama sebagai penasihat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi.[39]

Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam tipologi ini, Islam bukanlah sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, melainkan merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik. Dan yang termasuk tipologi ini adalah Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), Sayyid Quthub (1906-1966), Abu al-'Ala al- Maududi (1903-1979), dan di Indonesia , Muhammad Natsir.

a. Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935)

Nama lengkap Rasyid Ridha ialah Muhammad Rasyid Ridha ibn Ali Ridha ibn Muhammad Syam al-Din al- Qalmuny. Ia dilahirkan di Desa Qalamun, tidak jauh dari Tripoli, daerah Syria (Syam) pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 H (1865 M). Menurut suatu keterangan, silsilah keturunan atau nasabnya masih bersambung kepada cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husein ibn Ali ibn Abi Thalib. Oleh karena itu, Muhammad Rasyid Ridha memakai gelar al-Sayyid di depan namanya.[40]

---

[39]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21

[40]Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1992/1993), Jilid III, h. 992

Muhammad Rayid Ridha bercita-cita untuk mewariskan keturunan yang mampu dan sadar untuk mengubah nasib umat yang dilanda segala macam *khurafat* dan *bid'ah* serta ajaran-ajaran yang telah menyeleweng dari kebenaran ajaran agama Islam. Dengan demikian, ia dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir radikal, berusaha untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggapnya telah menyimpang dari Al- Qur'an dan Hadist.[41]

Pada dasarnya, pokok-pokok pikiran dan usaha yang dilakukan Ridha dalam perjuangan umat Islam tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pikiran para tokoh pembaru lainnya, seperti Jamaluddin al- Afghani dan Muhammad Abduh, yaitu berpangkal pada segi keagamaan, tuntutan adanya kemurnian jaran Islam, baik dari akidahnya atau dari segi amaliahnya.[42]

Sistem politik Islam menurut Rasyid Ridha adalah tauhid, risalah dan khalifah. Prinsip tauhid akan menolak konsep kedaulatan hukum dari manusia, baik secara individual maupun lainnya. Menurut Ridha, satu-satunya yang berdaulat hanyalah Allah semata-mata. Risalah merupakan perantara manusia dengan Tuhannya melalui Rasul dan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum yang abadi. Oleh karena itu, risalah harus menjadi dasar politik Islam.[43]

Rasyid Ridha telah berusaha keras dalam merumuskan ide-idenya bahwa Islam merupakan suatu konsep yang utuh dan lengkap dalam segala sesuatu. Ridha menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan teori klasik

---

[41]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 77

[42]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,..., h. 76

[43]Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 192

tentang kekhalifahan telah menetapkan tolok ukur bagi penyelenggaraan kekhalifahan secara benar.[44]

Kendati pandangan Rasyid Ridha mencerminkan alam pikiran politik Islam klasik dan pertengahan yang sulit diterima masa kini, di mana Rosenthal menganggapnya berada dalam posisi "utopis dan romantis", Rasyid Ridha telah berhasil memformulasikan tradisi dan merencangkan gagasan dasar bagi para penganjur negara belakangan.[45]

b. Sayyid Quthub

Sayyid Quthub adalah ideolog gerakan al-Ikhwan al-Muslimin. Dilahirkan di Desa Qaha, Provinsi Asy-yut pada 1906. Ayahnya , Haji Quthub ibn Ibrahim adalah seorang petani kelas menengah yang berada dan menjadi anggota partai nasionalis. Ibunya adalah seorang muslimah yang religius yang sangat memperhatikan pendidikan Sayyid Quthub dengan menanamkan rasa keberagaman yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan yang mendalam.[46]

Sebagai tokoh yang memandang Islam sebagai agama yang sempurna, Sayyid Quthub menyatakan segala permasalahan kehidupan umat manusia telah diatur dalam Islam, tidak terkecuali masalah politik ketatanegaraan. Sebagai konsep politik, Islam mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi ciptaan manusia. Ia memaparkan tujuh karakteristik konsepsi Islam tersebut[47], yaitu:

---

[44]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,..., h. 83
[45]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*,...,h. 22
[46]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,..., h. 204
[47]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,..., h. 206-208

Pertama, *rabbaninyah* (ketuhanan). Menurut Sayyid Quthub, *rabbaniyah* merupakan konsep pertama dan utama yang menjadi sumber bagi karakteristik-karakteristik lainnya. Islam bersumber pada Al- Qur'an yang berasal dari Allah. *Kedua*, Konstan. Dalam Islam, ada nilai-nilai universal yang bersifat konstan dan tidak boleh diubah-ubah. Ini merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga jiwa dan kehidupan mereka agar bergerak dan berputar pada poros yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jiwa dan kehidupan mereka akan berjalan sesuai dengan sunah (hukum alam).

Ketiga, menyeluruh (komprehensif, universal). Karena Islam berasal dari Allah, maka ia bersifat universal. Islam terlepas dari segala kekurangan, kelemahan, kelalaian dan kontradiksi. *Keempat*, keseimbangan. Ada doktrin Islam yang bisa dipahami dan ada pula yang tidak bisa dipahami. Menurutnya, sebuah akidah yang tak mengandung hal-hal gaib dan tak diketahui oleh manusia, yang tidak mengandung hakikat yang lebih besar dari yang sanggup dipahami manusia, bukanlah akidah.

Kelima, keaktifan. Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap aktif dalam kehidupan dunia. Sebagai khalifah, manusia harus senantiasa progresif menciptakan kemajuan bagi kehidupan mereka, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Keenam, realistis. Islam berpijak pada hal-hal yang bersifat empiris realistis. Tidak ada ajaran-ajaran Islam yang tidak bersifat riil. Karena ajaran Islam selalu sesuai dengan kondisi riil manusia dan Islam tidak membebankan sesuatu yang berada diluar kemampuan manusia. Ketujuh, tauhid. Ajaran ini

mengisyaratkan bahwa tidak ada hakim selain Allah, tidak ada pembuat syara' selain Allah dan tidak ada pengatur kehidupan manusia selain Allah.

Sayyid Quthub dan al- Maududi telah mengembangkan bentuk pemerintahan, yang dalam istilah Prof. Majid Khadduri, *devine nomocracy* (negara hukum ilahi)[48] dan juga orang pertama yang menggunakan pengertian bahwa umat manusia adalah khalifah Allah di muka Bumi sebagai dasar teori kenegaraan. Manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan, yang sebab itu tidak dibenarkan membuat kebijakan yang bertentangan dengan ajaran dan hukum Tuhan.

c. Mohammad Natsir

Lahir di ranah minang, tepatnya Alahanpanjang, Solok, 17 Juli 1908. Pendidikan Formal Muhammad Natsir dimulai pada usia delapan tahun , saat ini memasuki HIS (*Hollandse Inlanse School*) Adabiyah Partikelir yang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad (tokoh pembaruan) di Kota Padang.[49]

Menurutnya Muhammad Natsir, agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia menganggap bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam[50]. Islam lebih dari sekedar sistem agama tetapi suatu kebudayaan yang lengkap. Negara adalah dua entitas religio-politik yang menyatu. Konstruk negara yang dicita-citakan Islam adalah negara yang berfungsi menjadi alat Islam secara formal mendasarkan Islam sebagai ideologinya. Ia

[48]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.207
[49]Novi Hendri, *Sejarah Pergerakan Islam*,...,h. 93
[50]Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir*, (Jakarta: UI-Press,2011),h. 69

berfungsi mengawasi berlakunya nilai-nilai Islam dan menjunjung tinggi supremasi hukum Islam.[51]

> " Untuk mencapai predikat "hamba Allah" tersebut, Allah memberikan aturan kepada manusia:" Aturan atau cara kita berlaku berhubungan dengan Tuhan yang menjadikan kita, dan cara kita yang berlaku berhubungan dengan sesama manusia. Di antara aturan-aturan yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara aturan-aturan yang berhubungan dengan muamalah sesama makhluk itu, ada diberikan garis-garis besarnya kepada seseorang terhadap masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang. Yang terkahir ini tak lebih-tak kurang ialah yang dinamakan orang sekarang dengan urusan kenegaraan.[52]

Natsir menegaskan negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan hanya alat merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Negara disini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan " kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri (sebagai individu) ataupun sebagai anggota masyarakat.

Natsir menegaskan, ajaran Islam memiliki sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan agama dan negara serta menjamin keragaman hidup berbagai golongan. Islam memiliki toleransi yang besar terhadap golongan minoritas. Kelompok minoritas tidak perlu takut kepada Islam karena mereka akan dilindungi dan kebebasannya akan terjamin.[53]

Segala aspek yang terdapat dalam kehidupan dunia dan akhirat itu diatur oleh ajaran-ajaran Islam. oleh karena Islam merupakan suatu ajaran yang serba mencakup. Dalam hal ini Natsir mengikuti prinsip Al-Qur'an agar setiap orang

---

[51]Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paradigma, 1998), h. 79-80

[52]Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam* ,...,h. 70

[53]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,...,h. 220

beriman kepada Allah dan Rasul, hendaknya mengatur segala aspek kehidupannya secara Islami, sebagaimana yang terdapat Q.S Al- Baqarah 208:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

2. Tipologi Sekuler dalam Pemikiran Politik Islam Modren

Menurut tipologi ini Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya, dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara. Negara tidak harus diatur agama. Demikian juga sebaliknya, negara juga tidak boleh mengintervensi urusan agama, karena agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Pemikir yang masuk tipologi ini adalah Ali Abd al- Raziq (1888-1966)dan di Indonesia Soekarno (1901-1970).[54]

a. Ali Abdurraziq

Ali Abdurraziq lahir pada tahun 1880 M di wilayah al-Mania, Mesir. Ayahnya seorang pembesar (gubernur) yang terpandang dan aktivis politik terkenal. Hasan Abdurraziq, nama lengkap ayahnya, adalah salah seorang sahabat Muhammad Abduh. Ali Abdurraziq menempuh pendidikan formalnya di al-Azhar sejak masih berusia 10 tahun bersama kakaknya Mustafa. Ia belajar hukum kepada Syekh Abu Khatwah, sahabat Abduh dan murid al- Afghani. Ketika

[54]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*,...,h. 26

menjadi hakim pada Mahkamah Syar'iyah di Mesir, ia sempat mengadakan penelitian terhadap lembaga khalifah. Hasil penelitiannya menjadi buku yang kontroversial dengan judul *Al- Islam wa Ushul al-Hukm.*[55]

Ali Abd al- Raziq pemikir Muslim yang menolak sistem khilafah sebagai sebuah sistem yang tidak mempunyai landasan yang kukuh dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Al-Qur'an katanya tidak menyebut kekhalifahan seperti yang kita kenal dalam sejarah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat diatas dianggap pendukung kekhalifahan dalam kenyataannya tidaklah demikian. Karena kata ulil amri (para pemegang kekuasaan) yang wajib diikuti kaum Muslim sesudah mentaati Allah dan Rasulnya tidaklah disepakati ulam tafsir dalam arti khalifah.

Demikian pula argumentasi wajibnya kekhalifahan untuk tujuan terlaksananya tugas-tugas keagamaan dan kepemerintahan tidaklah juga

[55]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,...,h. 112

tepat.Raziq memang mengakui pentingnya negara untuk kepentingan sosial, lepas dari agama dan keyakinan, tetapi tidak harus berbentuk kekhalifahan, tetapi bisa beraneka ragam bentuk dan sifatnya.

Menurutnya Nabi adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk mendakwahkan Islam tanpa bermaksud mendirikan negara. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul semata-mata mengabdi pada agama. Nabi tidaklah mempunyai kekuasaan sekuler, mendirikan kerajaan atau suatu negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik. Posisi Nabi Muhammad hanya sebagai rasul semata itu, bagi Rizieq dikukuhkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan jelas mengungkapkan bahwa nabi tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan politik.[56] Antara lain Q.S Al- An'am 66:

وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوۡمُكَ وَهُوَ ٱلۡحَقُّۚ قُل لَّسۡتُ عَلَيۡكُم بِوَكِيلٖ ٦٦

Artinya : *Dan kaummu mendustakannya (azab) Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah: "Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu".*

Nabi Muhammad SAW memang mempunyai *hukumah*, tetapi dia bukanlah seorang *malik* (raja). Menurutnya, *malik* yang berkuasa pada masa itu pada umumnya zalim dan kejam terhadap rakyat. Oleh karena itu Nabi tidak dapat disamakan dengan penguasa politik apa pun. Dengan demikian, Ali Abdurraziq berkesimpulan bahwa sitem pemerintahan tidak terdapat dalam Islam. Jadi Islam tidak menentukan tentang pembentukan negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu pemerintahan. Nabi hanya bertugas sebagai

[56]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam*,...,h.28

pembawa risalah, dan tugas kerasulannya ini tidak mencakup di dalam tugas pembentukan negara. [57]

b. Ir Soekarno

Dilahirkan pada permulaan era kebangkitan dan pergerakan nasional. Tepatnya pada Kamis pon tanggal 6 Juni 1901 di Lawang Seketeng Surabaya. Ia adalah anak kedua dari kandungan Ibu Idayu Nyoman Ray. Ayahnya bernama R. Soekemi Sosrodiharjo, sedangkan kakeknya bernama Soekarmini. Kakeknya bernama Raden Hardjodikromo, orang yang dipandang mempunyai ilmu hikmah (ilmu gaib) dan seorang ahli kebatinan. Sedangkan ibunya menurut pengakuan Soekarno adalah seorang bangsawan keturunan Bali Kasta Brahmana.[58]

Pendidikan pertama Ir Soekarno yang bersifat formal adalah pendidikan bergaya Barat di Tulung Agung, *Aeropeesche Largere School* (ELS) pada tahun 1914. Setelah lulus dia melakukan kajian ke Horgere Burger School (HBS) tahun 1915 dan lulus tanggal 1921. Masa kajiannya di ELS dan HBS ini menyadarkan akan keburukan deskriminasi sistem pemerintahan kolonial.

Mengenai gagasan pemisahan agama dan negara Soekarno mengemukakan pendapatnya:

> ".....bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari asuhannya (negara), supaya menjadi subur. Kalau Islam terancam bahaya pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena diurus pemerintah. Umat Islam terikat kakitangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintah. Hal ini adalah suatu halangan besar sekali buat kesuburan Islam di Turki dan bukan saja di Turki, tetapi di mana-mana sahaja, karena pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, di situ menjadilah ia satu halangan besar yang tak dapat dielakkan.[59]

---

[57]Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*,...,h. 116

[58]Novi Hendri, *Sejarah Pergerakan Islam*,...,h. 91

[59]Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi,* (Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid 1, 1964), h. 404

Soekarno kemudian mengutip ucapan Kemal :

> "saya memisahkan Islam dari ikatan negara, agar supaya Islam bukan hanya tinggal agama memutar tasbih di dalam mesjid sahaja, tetapi menjadilah satu gerakan yang membawa kepada perjuangan".[60]

Tujuan Kemal dan para pendukungnya memisahkan agama dan negara, menurut Soekarno bukan untuk mendurhakai Islam, tetapi justru agar Islam dapat lepas dari belenggu yang menghalangi kemajuaannya.Argumen yang diajukan Soekarno adalah karena jika agama diperkenankan hadir dalam wilayah publik, ia akan menjadi alat politik belaka bagi yang berkepentingan dan juga akan melahirkan rasa diskriminasi bagi pemeluk selain agama publik tersebut. Menurut Soekarno, yang mesti diambil dari agama (semisal Islam) adalah 'api' atau semangatnya saja dan karakter agama juga harus rasional, kultural, dan progresif.[61]

Dengan adanya pemisahan agama dari negara ini menurut jalan pemikiran Soekarno tidak dengan sendirinya ajaran Islam dikesampingkan, sebab rakyat dapat memasukkan Islam kedalam kebijaksanaan politik negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat; (DPR). Soekarno meyakini demokrasi sebagai alternatif bentuk negara, bila timbul masalah pemisahan agama dari negara. Menurutnya, dalam negara demokrasi ni, semua kelompok agama dituntut menguasai perlemen, sebab bila mereka menguasai lembaga itu secara otomatis menguasai negara.

3. Tipologi Moderat dan Bentuk Pemerintahan Ideal dalam Pemikiran Politik Islam Modern

   Tipologi ini menolak klaim ekstrem bahwa Islam adalah agama yang

[60]Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*,...,h. 404
[61]Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara*,..., h. 79-80

lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrem kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk pelaksanaanya umat Islam bebas memilih sistem mana pun yang terbaik. Dan yang termasuk tipologi ini di antaranya Muhammad Abduh (1862-1905) dan di Indonesia Nurcholish Madjid.[62]

a. Muhammad Abduh

Dilahirkan pada 1849 M di sebuah desa di lembah Sungai Nil. Ayahnya, Abduh Hasan Khairullah adalah seorang keturunan Turki yang telahlama menetap di Mesir. Adapun ibunya adalah seorang Arab yang masih mempunyai hubungan dengan keluarga Umar ibn al-Khattab. Pendidikan dasar Abduh ditangani langsung oleh ayahnya yang mengajarkan membaca dan menulis serta ilmu keislaman. Abduh menyelesaikan studinya di Al Azhar pada 1877.[63]

Menurut Abduh, ajaran Islam terbagi dua, yaitu masalah ibadah yang tidak memerlukan ijtihad dan masalah muamalah (sosial kemasyarakatan) yang menjadi lapangan ijtihad. Terhadap masalah kedua ini umat Islam tidak perlu mempertahankan pendapat pendapat ulama masa lalu, apabila tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Umat Islam tidak salah bila meniru Barat, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.[64]

Islam menurut Muhammad Abduh bukanlah agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama

[62]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*,...,h. 31
[63]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,...,h. 66
[64]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*,...,h. 73

Muslim dan sesama manusia lainnya yang untuk itu dibutuhkan penguasa atau negara. Baginya kepala negara merupakan seorang sipil yang diangkat dan diberhentikan rakyat, dan kepada mereka dia bertanggung jawab. Seiring dengan pengakuannya akan konsep demokrasi, Program Partai Nasional Mesir yang dirumuskannya sendiri membuka keanggotaan kepada seluruh rakyat Mesir, yang beragama Islam, Yahudi, Kristen atau lainya.[65]

b. Nurcholish Madjid

Menurutnya Islam baik dalam teori atau praktik telah menetapkan prinsip-prinsip politik. Prinsip-prinsip itu, dengan mengikuti Robert N. Bellah dan apa yang terdapat dalam "Piagam Madinah" yaitu pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan semua penduduk, dan keadilan sebagi sebagai tujuan negara.

Nurcholis Majid berkesimpulan, *pertama*, konsep Islam di bidang politik berada pada pertengahan antara dua pendapat ekstrem yang berlawanan Sayyid Quthub dan Ali Abdurrazaq. *Kedua*, meski memiliki kekurangan, demokrasi dipahaminya sebaga sesuatu yang tiada ternilai harganya yang untuk sampai sekarang belum ditemukan alternatif yang lebih unggul. Demokrasi baginya adalah *majority rule minority right* yaitu sistem politik dengan prinsip mayoritas dengan tidak mengganggu kepentingan atau hak minoritas yang paling fundamental.[66]

Meskipun belakangan pemikiran Cak Nur (panggilan akrab Nurcholis Madjid) lebih cenderung sekuler, meski juga tetap bisa dikatakan moderat. Kendati menolak sekulerisme, dalam arti ideoligi atau paham tertutup yang

[65]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,...,h. 132-133
[66]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*,...,h. 36

semuanya harus serba sekuler (duniawi), tetapi ia menganjurkan dilakukannya sekularisasi. Namun, yang dimaksudnya dengan sekularisasi ini bukanlah upaya penerapan sekularisme yang serba duniawi itu, tetapi menduniawikan hal-hal yang seharusnya duniawi dan melakukan desakralisasi terhadap hal-hal duniawi yang dinilai masyarakat Muslim bersifat sakral, tidak profane, sehingga seolah bersifat ukhrawi.[67]

Dengan gagasannya "Islam Yes, Partai Islam No" Nurcholis Majid berusaha mencairkan hubungan Islam dengan negara. Memang pada mulanya gagasan ini mendapat resistensi dari sebagian kalangan umat Islam. Bagi Cak Nur, partai Islam bukanlah satu-satunya alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam.[68] Ide tentang perta Islam tidak lagi menarik dan kehilangan dinamika. Menurut Cak Nur:

> "Jika partai-partai Islam merupakan ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik. Dengan perkataan lain, ide-ide dan pemikiran Islam itu sekarang sedang menjadi absolute memfosil, kehilangan dinamika. Ditambah lagi, partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan yang ada ialah image sebaliknya".[69]

Pemikiran sekularisasi politik Cak Nur yang kendati seolah melegitimasi politik sekuler Orde Baru tersebut, tetapi secara langsung berpengaruh terhadap perubahan politik Orde Baru dari sebelumnya anti Islam tetapi kemudian di akhir dasawarsa 1980-an dalam batas-batas tertentu mengalami proses islamisasi.

---

[67]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*...,h. 37
[68]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*...,h. 73
[69]Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara*...,h. 276

BAB III

GAMBARAN UMUM FPI BUKITTINGGI

A. Latar Belakang Berdirinya DPW FPI Bukittinggi

Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi massa Islam yang cukup penting pasca reformasi Indonesia. Organisasi ini pertama kali dicetuskan di Petamburan- Jakarta dan dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm- Ciputat- Tanggerang pada tanggal 25 Robi'uts Tsani 1419 H bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyyah yang dipelopori oleh seorang haba'ib, ulama, mubaligh serta aktivis muslim yaitu Habib Muhammad Rizieq Shihab dan juga dihadiri oleh K.H Cecep Bustomi, HabibIdrus Jamalullail, K.H Damanhuri.[1]

Pada tahun 2000-an FPI sudah masuk ke Sumatera Barat, ketika seorang Buya yang tidak diketahui namanya yaitu pimpinan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Padang Panjang pulang dari Jakarta membawa surat mandat dari Habib Rizieq untuk pembentukan pengurus FPI di Sumatera Barat. Ketika sampai di Padang Panjang, Buya tersebut menunjuk Ustadz Radison sebagi penanggung jawab. Namun, ketika itu umur FPI hanya sebentar saja. Setelah dideklarasikan di terminal Padang Panjang, kemudian dilanjutkan dengan taklim-taklim pembekalan kepada anggota yang baru bergabung, namun lama-kelamaan anggota tambah berkurang dan akhirnya habis begitu saja.[2]

Pada Minggu, 15 Januari 2011 beberapa orang pengurus DPD FPI Riau melakukan kunjungan *muhibbah* ke Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Kota

[1]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 130

[2]http://www.fpisumbar.com/2017/11diakses tanggal 10 juli 2018 jam 20.30

Bukittinggi, selain untuk bersilahturahim kunjungan tersebut juga bertujuan untuk pembentukan FPI di Sumatera Barat. Akan tetapi hasil dari kunjungan itu tidak membuahkan hasil yang maksimal terhadap keberadaan FPI di Sumatera Barat.[3]

Pada bulan September 2012 MMI Kota Bukittinggi menemui Buya Busra untuk mengatur pembentukan kembali FPI di Sumatera Barat. Diadakanlah rapat di Pondok Al-Qur'an Jakfar di Surau Gadang Mandiangin yang bertujuan untuk pembentukan FPI di Sumater Barat. Rapat tersebut di hadiri Buya Busra, Yustanur, Fitra Yadi, Drs. Alfi Umar. Abdullah Mahmud, H. Feri Anderson, Abu Jakfar. Dari rapat tersebut ditunjuklah Buya Busra sebagai ketua, Fitra Yadi sebagai sekretaris dan Yustanur sebagai bendahara. Kepengurusan DPD FPI Sumatera Barat pertama kali di SK kan oleh Al- Habib Muhammad Rizieq Syihab, LC, MA.[4]

Setelah pembentukan DPD FPI Sumatera Barat, pada bulan November 2012 terbentuklah Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) FPI untuk Kota Bukittinggi dan Agam. FPI di Kota Bukittinggi sebagai garda terdepan merupakan cikal pertama adanya FPI di Sumatera Barat sehingga sulit dibedakan antara FPI Sumatera Barat dengan FPI Kota Bukittinggi.[5]

Masa kepengurusan FPI Kota Bukittinggi sebagaimana yang di SK kan hanya berlaku selama lima tahun dan itu berarti kepengurusan tersebut berakhir pada tahun 2016. Kemudian selama 1 tahun FPI Kota Bukittinggi vakum yang artinya kepengurusan FPI tidak ada di Bukittinggi. Pada akhir 2017 diberikan

[3]http://www.fpisumbar.com/2017/11diakses tanggal 10 juli 2018 jam 20.30

[4]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barta pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

[5]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barta pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

surat mandat dari pusat untuk terbentuknya kembali FPI di Bukittinggi. Dari hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 23 Maret 2018 maka terpilihlah Khairul Azmi sebagai ketua FPI Kota Bukittinggi. Khairul Azmi adalah ketua ke dua FPI Bukittinggi dan secara definitif merupakan ketua pertama yang dipilih dari hasil Muswil FPI Bukittinggi.[6]

Dibentuknya FPI di Bukittinggi dikarenakan masyarakat Bukittinggi masih peduli dalam penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kota Bukittinggi yang disebut kota wisata masih rentan dengan kemaksiatan, narkoba, prostitusi serta dikarenakan supremasi hukum yang tidak berdiri. FPI dipilih menjadi salah satu ormas yang dibutuhkan masyarakat karena satu-satunya ormas Islam yang konsen untuk *amar ma'ruf nahi munkar* dan peduli untuk masalah sosial kemasyarakatan.[7]

B. Visi dan Misi DPW FPI Kota Bukittinggi

Sebagaimana yang terdapat dalam AD/ART visi dan misi organisai FPI adalah penerapan Syariat Islam secara *Kaafah* di bawah naungan *Khilafah Islamiyyah* menurut *Manhaj Nubuwwah*, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakkan *Hisbah* dan Pengamalan Jihad.[8]

Dari visi dan misi tersebut maka ada 3 medan juang FPI Bukittinggi:

1. Dakwah Islamiyah

Yaitu memberikan pemahaman Islam kepada umat, menebarkan kebaikan dan mengajak umat untuk berlomba lomba dalam mencari ridho Allah. Dalam

[6]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barta pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

[7]Hasil wawancara dengan Ustadz Khairul Azmi Ketua DPW FPI Bukittinggi pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

[8]Pasal 6 Anggaran Dasar Front Pembela Islam Tahun 2013

pandangan FPI dakwah wajib dilakukan secara lembut, sopan, santun dan tidak boleh secara kekerasan. Pelaksanaan dakwah Islamiyah salah satunya dengan melakukan tablig-tablig akbar di Kota Bukittinggi.[9]

2. Hisbah

Disebut juga *ihtisab* yaitu upaya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam menegakkan *hisbah* diperlukan sikap yang tegas berbentuk seruan dan instruksi kepada masyarakan untuk berbuat kebaikan. Penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ini merupakan tugas dari pemerintah, namun apabila pemerintah tidak mau ataupun tidak mampu maka tugas tersebut merupakan tugas semua umat Islam.Front Pembela Islam Kota Bukittinggi membantu masyarakat Bukittinggi dalam terlaksananya *amar ma'ruf nahi munkar*.[10]

Dalam penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ini sesuai dengan perintah Allah Qs Ali Imran ayat 104, 110 dan hadist.

QS. Ali-Imran 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf danmencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*[11]

[9]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barta pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

[10]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barta pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

[11]Al- Qur'an Surat Ali-Imran ayat 104

QS Ali- Imran ayat 110:

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranyaahlikitabberiman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*[12]

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

Artinya: *Nabi Muhammad saw. bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan benarbenarmencegah dari yang munkar atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman/siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut, kemudian kalian berdo'a kepada-Nya namun do'a kalian tidak lagi dikabulkan."(HR. Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman, hadits no. 2259).*[13]

3. Jihad

Jihad dilakukan dengan keras. Bagian dari jihad itu baik di dalam negeri

[12]Al-Quran Surat Ali- Imran ayat 110

[13]Mohammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Tarjamah Sunat At Tirmidzi*, penerjemah: Drs. H.Moh. Zuhri, Dipl, TAFL., dkk,(Semarang: CV. Asy Syifa',tt), h.109

maupun di luar negeri. Seperti FPI turun langsung ke daerah Palestina dan juga menggalang dana ke daerah-daerah untuk didonasikan ke umat muslim Palestina. Dalam berjihad wajib keras dan berani, maka motto dari FPI Bukittinggi '*Isy Kariman aw Mut Syahidan,* hidup mulia atau mati syahid.[14]

Dari pembagian medan juang tersebut maka tugas-tugas dari FPI Bukittinggi[15]:

1. Membela agama. Ketika menurut pandangan FPI terjadi penistaan agama maka kita wajib membelanya. Seperti terjadi pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok di Jakarta, FPI Bukittinggi ikut serta dalam aksi penolakan tersebut.
2. Melayani umat. Seperti terjadinya bencana alam daerah-daerah Bukittinggi khususnya maupun di daerah lain. Anggota FPI akan turun menjadi relawan serta mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Jadi FPI berjuang untuk melayani umat.
3. Benteng *Sunni* atau *ahlu sunnah wa jamaah*. Yang dimaksud *sunni* dalam pandangan FPI adalah dalam akidah merujuk pemahaman Imam Asy'ari dan fikih merujuk kepada Mazhab Imam Syafi'i.

C. Format Kepemimpinan, Stuktur dan Kekuasaan Dalam FPI

1. Kepemimpinan dan Stuktur Organisasi

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat pusat terdiri dari Imam Besar, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi.

[14]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barat pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

[15]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barat pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

b. Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) di luar negeri terdiri dari Imam, Majelis Syura Dewan Tanfidzi.
c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi terdiri dari Imam, Majelis Syura Dewan Tanfidzi.
d. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat kota/ kodya/ kabupaten adalah Dewan Tanfidzi Wilayah.
e. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan adalah Dewan Tanfidzi Cabang.
f. Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) di tingkat kelurahan/ desa adalah Tanfidzi Kelurahan.
g. Pengurus Inti

1). Pengurus Inti Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah adalah: seorang ketua, seorang sekretaris, lima orang ketua Majelis Front, yaitu: Dewan Syariat, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas, yang beranggotakan sekurang-kurangnya 33 orang dan sebanyak-banyaknya 99 orang.[16]

Untuk melaksanakan tugasnya, ketua umum dibantu oleh kepala departemen yang berjumlah 12, yaitu Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Bela Negara dan Jihad, Departemen Sospol dan Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Ekuin, Departemen Ristek, Departemen Pangan, Departemen

[16]Pasal 10 Anggaran Dasar Front Pembela Islam Tahun 2013

Kesra, Departemen Penerangan, dan Departemen Kewanitaan.[17]

2). Pengurus Inti Dewan Tanfidzi di tingkat Pusat adalah: seorang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang wakil sekretaris umum dan beberapa wakil bendahara umum.[18]

3). Pengurus Inti Dewan Tanfidzi di tingkat selain pusat adalah: seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.[19]

h. Organisasi FPI memiliki lima badan khusus yaitu:

1) Badan Ahli Front (BAF). Bertugas antara lain mengembangkan sumber daya anggota khususnya dan umat Islam pada umumnya, meneliti dan mencari sistem yang tepat untuk pengembangan FPI, dan mengontrol dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara aktif.
2) Badan Pengkaderan Front (BPF). Bertugas membentuk lembaga khusus melakukan pengkaderan, membentuk satuan-satuan tugas tugas yang terlatih secara fisik dan mental untuk keselamatan front dan umat Islam, dan memberikan laporan rutin kepada sekretaris jenderal.
3) Badan Hukum Front (BHF). Berperan sebagai penasehat hukum dan pembela keselamatan front, membela dan membantu kaum *mustad'afin* dalam soal hukum, dan memberikan laporan rutin tugas BHF kepada sekretaris jenderal.[20]
4) Badan Investigasi Front (BIF). Bertugas untuk melakukan investigasi

[17]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal...*, h. 150
[18]Pasal 10 ayat 7 poin b Anggaran Dasar Front Pembela Islam Tahun 2013
[19]Pasal 10 ayat 7 poin c Anggaran Dasar Front Pembela Islam Tahun 2013
[20]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal...*, h. 150

terhadap berbagai persoalan buruk terhadap Islam dan FPI, BIF memiliki dua divisi:

a) Devisi Intelejen. Devisi ini bertugas untuk melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala aktivitas yang merugikan Islam dan FPI.

b) Devisi Pencari Fakta. Devisi ini bertugas mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data untuk membuktikan keakuratan intelejen FPI[21].

5) Badan Amil Zakat (BAZ). Bertugas untuk penyuluhan dan menyadarkan akan kewajiban zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai syari'at Islam. serta mengadakan rekruitmen keanggotaan wajib zakat secara tetap dan membangun informasi, pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi.[22]

i. Organisasi FPI memiliki lima Lembaga Otonom [23]yaitu:

1) Pemantau Ma'siat Front (PMF). Lembaga ini bertugas sebagai pemantau independen terhadap kemaksiatan di Indonesia. Khususnya, terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha maksiat dan para pelindungnya dari kalangan pejabat negara, termasuk aparat keamanan.

2) Lembaga Dakwah Front (LDF). Merupakan wadah silahturrahim para mubaligh/ da'i FPI, sekaligus pusat pengembangan da'wah Islam yang diprogramkan FPI. LDF memiliki dua fungsi, internal dan eksternal. Fungsi internal adalah mensosialisasikan da'wah dikalangan aktifis FPI,

[21]Ari Febriansyah Ismail, *Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar*, Skripsi. Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016

[22]M. Sadidul Bayad, *Gerakan Front Pembela Islam (FPI) di Pasuruan Tahun 2015-2017*, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Sunan Apel Surabaya, 2017

[23]Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Front Pembela Islam Tahun 2013

termasuk pembinaan mental, spiritual dan pengembangan sumber daya da'wah yang dimiliki FPI, sedangkan fungsi eksternalnya adalam mensosialisasikan da'wah Islam di tengah masyarakat.

3) Lembaga Ekonomi Front (LEF). Tugas LEF adalah membangun ekonomi FPI agar tidak menjadi organisasi yang lemah. Untuk itu, LEF berkewajiban melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek, sehingga kedepan FPI mampu memiliki "*Profit Center*" yang ditangguh untuk mendanai perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar.*
4) Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF). Sebagai lembaga yang membantu dalam melakukan litigasi advokasi untuk aktivitas FPI tanpa pamrih.
5) Lembaga Kemanusiaan Front bernama Hilal Merah Indonesia (HILMI). Terdiri dari relawan untuk tugas-tugas kemanusiaan dalam bencana kemanusiaan dan bencana alam.[24]

j. Organisasi FPI memiliki empat anak organisasi yang otonom dan independent serta memiliki AD/ART, struktur organisasi, garis komando, program kerja dan pertanggung jawaban sendiri, yaitu:

1) Laskar Pembela Islam (LPI). LPI adalah anak organisasi otonom dan Independen serta memiliki stuktur organisasi, garis komando, program kerja dan pertanggung jawaban serta AD/ART sendiri. LPI adalah barisan pemuda Islam militan yang mewakafkan dirinya sebagai pelayan umat dan pembela agama.

[24]M. Sadidul Bayad, *Gerakan Front Pembela Islam (FPI) di Pasuruan Tahun 2015-2017*, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Sunan Apel Surabaya, 2017

2) Mujahidah Pembela Islam (MPI). MPI adalah barisan pejuang muslimat militan yang mengusung misi untuk memperjuangkan kaum wanita agar berada pada posisi yang mulia dan terhormat di dunia maupun akhirat.
3) Serikat Pekerja Front (SPF). SPF merupakan barisan pekerja Islam militan yang berprofesi sebagai buruh/ pegawai/ karyawan diberbagai pabrik dan perusahaan. Misi utamanya mengangkat harkat dan martabat serta kesejateraan para pekerja muslim sesuai aturan Syari'at Islam.
4) Front Mahasiswa Islam (FMI.) FMI merupakan barisan mahasiswa Islam militan yang memperjuangkan Islam melalui jalur akademik dan Intelektual secara berwibawa dan terhormat sesuai aturan Syari'at Islam.[25]

2. Kekuasaan Organisasi

Kekuasaan tertinggi organisasi FPI adalah Musyawarah, sesuai tingkat kepemimpinan organisasi:

a. Musyawarah di tingkat nasional terdiri dari Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) dan Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS). MUNAS diselenggarakan setiap tujuh tahun sekali oleh DPP.
b. Musyawarah di tingkat luar negeri adalah MLN yang pesertanya adalah Imam dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri yang kekuasannya akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali oleh DPLN.

[25]Pasal 19 huruf c Anggaran Rumah Tangga Front Pembela Islam Tahun 2013

c. Musyawarah di tingkat daerah terdiri dari Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA), yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. MUSDA diselenggarakan lima tahun sekali oleh DPD.
d. Musyawarah di tingkat wilayah terdiri dari Musyawarah Wilayah (MUSWIL), Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB), Musyawarah Kerja Wilayah (MUSPIMWIL), yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. MUSWIL diselenggarakan lima tahun sekali oleh DPW.
e. Musyawarah di tingkat cabang adalah Musyawarah Cabang (MUSCAB), diselenggarakan setiap empat tahunsekali oleh DPC, yang pesertanya adalah seluruh pengurus DPC-FPI, dan para ketua dan sekretaris dewan tiap-tiap DPRa-FPI serta 1 orang utusan DPD FPI setempat, yang kekuasaanya lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
f. Musyawarah di tingkat ranting adalah Musyawarah Ranting (MUSRAN), diselenggarakan setiap tiga tahun sekali oleh DPRa, yang pesertanya adalah seluruh pengurus DPRa-FPI dan para anggota FPI di ranting tersebut serta utusan DPW-FPI setempat, yang kekuasannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
g. Pimpinan sidang MUNAS, MLN, MUSDA, MUSWIL, MUSCAB, dan MUSRAN adalah Dewan Pimpinan periode berjalan di tiap tingkatan.[26]

[26]Pasal 11 ayat 1 sampai 7 Anggaran Dasar Front Pembela Islam tahun 2013

3. Dewan Tanfidzi DPW FPI Bukittinggi dan keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Tanfidzi Pusat FPI No: 0132/ SK-DPW/ DT- DPP FPI/ Rajab/ 1439 H tentang Pengesahan Susunan dan Penetapan Personalia Dewan Tanfidzi DPW- FPI Kota Bukittingi- Sumatera Barat periode 2018- 2023, susunan kepengurusannya adalah:

Ketua Tanfidzi : Ustadz Khairul Azmi

Sekretaris : Ustadz Irsyadul Halim

Bendahara: Ustadz Jasmir[27]

Mengenai jumlah anggota FPI Kota Bukittinggi untuk sekarang ini tidak disebutkan berapa jumlahnya. Karena dalam organisasi FPI keanggotaannya dibagi 2[28]:

1. Anggota biasa , yaitu seluruh orang yang ikut serta dalam kegiatan Front Pembela Islam. Jumlahnya tidak terbatas sehingga setiap orang yang ikut serta dalam aksi FPI dapat disebut anggota FPI biasa.
2. Anggota yang sudah teregistrasi yaitu anggota yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota sehingga merekalah yang ditunjuk sebagai pengurus. Dalam satu kabupaten/ kota minimal ada tujuh orang pengurus.

Seperti apa yang disampaikan Buya Busra dengan mengutip dari ucapan Habib Rizieq:

> "kalau orang bertanya berapa jumlah anggota FPI maka kita tidak mau berspekulasi karena FPI itu adalah semangat juang, maka bahasa yang kita pakai adalah siapa yang mau membantu agama Allah sesungguhnya dia adalah anggota FPI".

[27]Foto Lembaran SK DPW FPI Kota Bukittinggi tahun2018-2023

[28]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barat pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

Jadi sampai sekarang tidak bisa dicatatkan berapa jumlah anggota FPI yang terdapat di Kota Bukittinggi.

D. Aksi- aksi FPI Bukittinggi dan Prosedur Standar FPI

Keberadaan FPI di Kota Bukittinggi telah berlangsung selama 7 tahun dan telah begitu banyak aksi-aksi yang dilakukan. Beberapa aksi dari FPI Bukittinggi[29]

1. Aksi penolakan Rumah Sakit Siloam pada tahun 2013
2. Penanaman pohon untuk daerah Agam, yang disebut dengan Agam Green
3. Bantuan korban longsor di Maninjau, banjir di Pangkalan dan banjir-banjir yang terjadi di Bukittinggi serta gempa di Aceh
4. Penggalangan dana untuk umat muslim Palestina dan Rohingya
5. Mengawal setiap ulama yang berkunjung ke daerah Sumatera Barat
6. Melaksanakan tabligh akbar di mesjid-mesjid Bukittinggi dan juga pernah mendatangkan ketua umum FPI Habib Rizieq ke Bukittinggi pada tahun 2013 dan 2014
7. Aksi-aksi bersih mesjid serta pembagian takjil pada bulan ramadhan.

Dan dari seluruh kegiatan yang dilakukan FPI dilakukan oleh dana sendiri-sendiri termasuk untuk operasional. Dana tersebut berasal dari anggota FPI serta sumbangan dari masyarakat. Karena di FPI semua dilakukan dengan ikhlas untuk menegakkan agama Allah dengan mengharapkan syurga-Nya.[30]

[29]Hasil wawancara dengan Buya Busra selaku Imam Besar FPI Sumatera Barat pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

[30]Hasil wawancara dengan Ustadz Khairul Azmi Ketua DPW FPI Bukittinggi pada 11 Juli 2018 di Kantor DPW FPI Bukittinggi

Setiap aksi FPI dalam melaksanakan *Hisbah* wajib memenuhi prosedur di bawah ini:[31]

1. Laporan masuk. Laporan masuk baik dari masyarakat maupun dari anggota FPI. Laporan ini wajib tertulis dan diterima secara resmi oleh organisasi Front Pembela Islam yaitu, sekretaris umum tingkat Dewan Pimpinan Pusat, dan sekretaris di tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Luar Negeri, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting.
2. Investigasi. Laporan tersebut dibawa dalam rapat pengurus FPI untuk pembentukan Tim Investigasi yang bertugas menghimpun fakta dan data
3. Pemetaan. Hasil investigasi dianalisis dalam rapat pengurus FPI untuk memetakan wilayah juang. Apabila dari hasil analisa dan pemetaan tersebut, disimpulkan bahwa kemaksiatan yang terjadi tersebut didukung oleh masyarakat sekitar, maka wilayah tersebut disimpulkan sebagai wilayah dakwah, sehingga FPI wajib mengirim para da'i untuk melakukan pembinaan masyarakat di wilayah tersebut. Sedangkan apabila dari hasil investigasi dan analisa, masyarakat setempat menolak kemaksiatan tersebut, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah *Hisbah*.
4. Laporan Keluar.Setelah menetapkan sebagai Wilayah *Hisbah,* maka FPI wajib menulis surat ajakan ke ulama, tokoh dan Ormas Islam, serta kelompok masyarakat lainnya untuk bersama FPI memprotes dan menolak tempat kemaksiatan tersebut. FPI wajib melakukan penggalangan

[31]Prosedur Standar Front Pembela Islam Hasil Munas III FPI tahun 2013

dukungan terus menerus dari masyarakat dan ulama setempat. Selain itu juga FPI wajib menulis surat protes ke pejabat sesuai tingkatan (SATPOL PP), POLSEK, POLRES, POLDA, POLRI, Lurah, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri, Presiden, DPRD, DPR RI) untuk minta pemberhentian kemaksiatan tersebut. Surat protes tersebut wajib dilampirkan tanda tangan warga sekitar tempat maksiat yang dikeluhkan sebanyak-banyaknya.

5. Dialog. Setelah surat dikirim, baik ajakan ke ulama dan ormas Islam setempat maupun surat protes ke pejabat setempat, maka wajib untuk mendatangi dan mengajak ulama dan pejabat setempat untuk berdialog dan mengajak mereka memberantas kemaksiatan dan tempat maksiat melalui kebijakan resmi negara.
6. Demontrasi. Dilakukan di kantor pemerintahan yang bewenang (Satpol PP, POLSEK, POLRES, POLDA, LURAH, Camat, Bupati/walikota, Gubernur, Presiden, DPRD, DPR RI) apabila pejabat setempat kurang merespon dialog sebagaimana prosedur No. 5, maka Demontrasi dilakukan setelah melalui evaluasi dan analisa hasil dialog.
7. Ultimatum. Dilakukan melalui surat kepada pejabat setempat dan tempat maksiat, yang berupa peringatan keras berdasarkan dalil hukum agama dan argumentasi hukum negara untuk menghentikan segala bentuk kemaksiatan.

8. Aksi. Apabila tidak juga direspon oleh pejabat pemerintahan setempat setelah langkah ketujuh, maka FPI melakukan langkah hukum dan Lobby Politik serta aksi simpatik lainnya.
9. Resiko. Resiko dalam melakukan aksi tersebut harus ditanggung sebagai konsekwensi logis dari perjuangan. Resiko dapat berupa, tuntutan balik, dimanfaatkan politik, difitnah atau bahkan dipenjara dan kematian.
10. Evaluasi. Setelah sembilan tahap tersebut dilakukan, maka wajib untuk melakukan evaluasi terhadap aksi-aksi *Hisbah* yang sudah dilakukan.

Dalam membela diri ketika menjalani aksi, FPI memiliki prosedur untuk membela diri:[32]

1. Melumpuhkan lawan dengan cara yang paling ringan resikonya
2. Setelah dilumpuhkan wajib menyerahkannya ke aparat yang berwenang
3. Bila terpaksa sekali maka dengan cara yang paling tegas dan keras, itu pun hanya dalam konteks bela paksa (*Noodweer*) atau bela diri (*overmach*).

Selain beberapa hal diatas, sebagaimana yang terdapat dalam Buku Prosedur Standar FPI terdapat beberapa larangan anggota FPI:

1. Dilarang melanggar hukum agama dan hukum negara
2. Dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, perusakan, penjarahan dan pembunuhan
3. Dilarang membawa/ menggunakan senjata tajam/ senjata api dan bahan bakar/ peledak
4. Dilarang melindungi, meminta/ menerima bantuan apapun dari pengusaha

[32]Prosedur Standar Front Pembela Islam hasil Munas III tahun 2013

ma'siat

5. Dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur layanan

Barangsiapa dari Anggota FPI yang dengan sengaja melanggar prosedur tersebut di atas maka:[33]

1. FPI tidak bertanggung jawab secara umum atas segala sepak terjangnya
2. Si pelanggar akan dikenakan sanksi organisasi yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan kadar kesalahannya
3. Bagi pelanggar pidana, maka FPI akan menyerahkannya kepada yang berwenang.

E. Pandangan Politik Front Pembela Islam

Dengan landasan amar ma'ruf nahi munkar, FPI mencoba merangkainya menjadi sebagai metode perjuangannya, termasuk pandangan politik. Dalam melaksanakan segala aktivitas politiknya, FPI merujuk kepada Qs Ali- Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Didirikan untuk membela agama, FPI memang tidak berafiliasi terhadap salah satu kekuatan politi tertentu tetapi mempunyai sikap netral terarah. Yang

[33]Prosedur Standar Front Pembela Islam

dimaksud dengan netral adalah tidak berkampanye untuk satu partai tertentu, sedangkan terarah berarti FPI hanya mnedukung partai Islam yang memperjuangkan hak-hak Allah dan hak-hak makhlu-Nya dengan menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dengan ungkapan lain, penegakkan moral dan agama merupakan agenda dan kegiatan FPI utama.[34]

Sikap itu pula yang diambil FPI berkenaan dengan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. FPI menyatakan sikapnya sebagai berikut. *Pertama*, mendukung sepenuhnya pelaksanaan SI-MPR 1998 selama sesuai dengan tuntuta reformasi. *Kedua*, mendukung segala bentuk aksi-aksi yang dilakukan secara damai untuk memberi masukan kepada SI-MPR.*Ketiga*, menolak dan menentang segala bentuk aksi-aksi anarkis yang bertujuan menggagalkan SI-MPR 1998 serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. *Keempat*, menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya pengamanan pelaksanaan SI-MPR 1998 kepada aparat keamanan dan menolak dengan sistem pengamana swakarsa yang melibatkan massa, karena bisa menimbulkan bentrokan antarmassa. Namun, bila aparat keamanan tidak mampu mengatasi situasi, pengamanan sistem swakarsa menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. FPI juga menyempaikan sikap solidaritas kepada para anak bangsa, para mahasiswa sebagai front terdepan dalam perjuangan rakyat Indonesia.[35]

[34]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*..., h. 136
[35]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*..., h. 137

BAB IV
GERAKAN DAN PANDANGAN POLITIK FRONT PEMBELA ISLAM BUKITTINGGI

A. Gerakan Front Pembela Islam Bukittinggi

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting pasca reformasi. Gerakannya yang kerap diwujudkan dalam tindakan-tindakan dan aksi yang radikal telah menimbulkan ketakutan bahkan menjadi momok bagi sebagian anggota masyarakat. Organisai ini dengan cepat dikenal masyarakat sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu merazia tempat-tempat hiburan yang mereka percaya sebagai sarang maksiat seperti klub malam, diskotik, kafe dan kasino[1]. Berdirinya FPI merupakan upaya untuk menegakkan amar *ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.)

Dalam ber *amar ma'ruf nahi munkar* Front Pembela Islam berpedoman pada dalil Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjelaskan tentang hal tersebut:

Qs Ali-Imran 104:

Artinya:*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan*

[1]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h29

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Qs Ali Imran 110:

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠

Artinya*: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Buya Busra dalam wawancara yang dilakukan:

> "Sebenarnya *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tugas pemerintah, namun apabila pemerintah tidak mau atau tidak mampu karena banyak kepentingan maka tugas *amar ma'ruf nahi munkar* itu adalah menjadi tugas semua umatIslam, jadi FPI membantu umat Islam agar terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar."[2]

Keberadan FPI di Kota Bukittinggi secara legal telah berlangsung selama tujuh tahun, dan selama itu lah pergerakan organisasi massa Islam ini telah berjuang dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar.* Secara umum pergerakan FPI Bukittinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khairul Azmi:

[2]Buya Busra, Imam Besar FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi,* hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

> "Bahwa FPI Bukittinggi memang lebih fokus kepada kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sedangkan dalam menegakkan nahi munkar FPI Bukittinggi bekerja sama dengan aparatur pemerintahan dan lembaga yang terkait. Tidak benar bahwa FPI melakukan aksi tanpa mengikuti prosedur seperti terkesan main hakim sendiri, karena FPI dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau yang disebut hisbah memiliki prosedur standar FPI sebagaimana yang terdapat dalam AD/ART".[3]

Hal senada juga disampaikan oleh Afriwal seorang simpatisan FPI Bukittinggi dan Rusde anggota Badan Informasi Front (BIF) bahwa selama mereka melakukan *hisbah*yaitu perintah untuk melaksanakan perbuatan baik, bila perbuatan baik itu telah ditinggalkan dan mencegah perbuatan munkar, apabila perbuatan munkar itu telah dikerjakan[4], FPI memiliki surat-surat izin untuk melakukan aksi dan terlebih dahulu telah berkoordinasi dengan pihak terkait.[5]

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Buya Busra mengenai pergerakan *hisbah* FPI di Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

> "Dalam melakukan *hisbah* yang pertama FPI mendapat laporan baik tertulis maupun tertulis. Laporan tersebut di investigasi untuk melihat apakah orang di sekitar mendukung atau tidak kegiatan tersebut. Jika masyarakat sekitar suka dengan tempat maksiat tersebut, maka disebut dengan medan dakwah maka FPI akan mengirim da'i untuk melakukan dakwah di wilayah tersebut. Tapi jika masyarakat di sekitar tempat maksiat tidak suka dengan keadaan tersebut tapi tidak berdaya, maka FPI akan membantu masyarakat dalam menangani hal tersebut. Jika laporan masyarakat tidak ditanggapi maka FPI ikut demo dengan masyarakat setempat."[6]

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Front Pembela Islam Bukittinggi dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* telah melakukan kegiatan

---

[3]Ustadz Khairul Azmi, Ketua DPW Bukittinggi 2018-2023, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

[4]Abdul Hayyie Al- Kattani, Nurdin, (*Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*), Terjemahan kitab Al- Mawardi, *Al- Ahkam As-Shulthaniyyah Wal-Wilayatuddiniyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees,2000), h.320

[5]Wawancara Pribadi, hari Minggu tanggal 22 Juli 2018

[6]Buya Busra, Imam Besar FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

sesuai dengan pedoman *hisbah* yang terdapat dalam Prosedur Standar FPI yaitu laporan masuk, investigasi, pemetaan, laporan keluar, dialog, demonstrasi,ultimatum, aksi, resiko dan evaluasi.

Front Pembela Islam merupakan organisasi yang cukup kontroversi, karena gerakannya yang kerap diwujudkan dalam tindakan dan aksi-aksi yang radikal. Dalam pemberitaan media massa begitu banyak permasalahan gerakan organisasi ini yang cenderung menyebut FPI sebagai aliran keras. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Buya Busra terhadap pemberitaan media massa. Sebagaimana yang beliau sampaikan:

> "Dalam menanggapi pemberitaan miring tentang FPI biasa saja, karena jika orang tidak suka maka orang akan berusaha untuk mencari kesalahan kita serta menjelek-jelekkan, biarkan lah anjing menggonggong asalkan khafilah tetap berlalu. Sebagaimana yang disampaikan Imam Syaf'i "saya bukannya tidak bisa menjawab ucapan-ucapan dan perkatanmu, tapi sesungguhnya singa tidak akan pernah mempedulikan gonggongan anjing".[7]

Dalam wawancara yang juga penulis lakukan dengan Inyiak Yustanur mengenai permalahan tersebut:

> "Tidak ada radikal atau kekerasan yang di ajarkan dalam organisai Front Pembela Islam, karena yang ada di dalam FPI hanya ketegasan sikap dalam bernegara dan agama."[8]

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Khairu Azmi"

> "FPI selama ini tidak pernah sekalipun bertindak radikal, karena semua aksi yang dilakukan telah memilik prosedur. Dan jika yang disebarkan oleh media FPI bertindak radikal itu merupakan upaya pembalikkan fakta dari pembelaan diri aksi tapi dijadikan sebagai momok untuk menjatuhkan nama FPI."[9]

---

[7]Buya Busra, Imam Besar FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

[8]Inyiak Yustanur, Ketua DPD FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Rabu tanggal 18 Juli 2018

[9]Ustadz Khairul Azmi, Ketua DPW Bukittinggi 2018-2023, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita simpulan bahwa di Front Pembela Islam tidak dikenal ajaran kekerasan atau radikal, yang ada hanya upaya pembelaan diri dan ketegasan sikap dalam bernegara dan beragama. Dalam menanggapi pemberitaan media itu merupakan hal biasa karena dalam menyuarakan kebenaran begitu banyak pihak-pihak yang tidak suka dan merasa terancam.

Selain melakukan wawancara dengan beberapa anggota Front Pembela Islam, penulis juga melakukan dengan beberapa orang warga Bukittinggi mengenai pandangannya terhadap Front Pembela Islam Bukittinggi:

1. Bapak Faisal Bashir Djambek, umur 70 tahun, pensiunan kantor walikota Bukittinggi. Menurut Bapak Faisal yang juga seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tahun 1968 berpandangan terhadap FPI Bukittinggi :

   > "FPI Bukittinggi bukanlah organisasi yang radikal, tetapi FPI adalah organisasi Islam yang sportif dengan titah perjuangannya. Akan tetapi, pihak-pihak lain menganggap kesportifitasannya itu radikal".[10]

2. Wirdiana Safitri, umur 24 tahun, guru di salah satu pesantren di Bukittinggi. Menurut Fitri sebagai salah satu aktivis kampus yang juga bergerak di bidang dakwah, dalam memandang FPI adalah sebagai berikut:

   > "kami sangat mendukung pergerakan dari FPI yang sangat totalitas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. FPI Bukittinggi seperti yang saya temui di jalansering melakukan penggalangan dana terhadap bencana alam yang terjadi. Menanggapi pemberitaan miring mengenai FPI saya tidak setuju, karena FPI yang saya ketahui adalah ormas yang menghormati

[10]Faisal Bashir Djambek, *wawancara pribadi*, hari Senin tanggal 23 Juli 2018

undang-undang jadi mereka akan melakukan aksi sesuai dengan AD/ART organsasi mereka".[11]

3. Ayu Silvia Putri, umur 22 tahun, mahasiswa Bukittinggi. Menurut Ayu

   " ketika mendengar kata FPI yang tergambar adalah orang-orang yang suka berkelahi, berambut gondrong dan sering melakukan demontrasi. Mengenai FPI Bukittinggi saya hanya mengetahui bahwa FPI Bukittinggi adalah orang-orang yang sering menggalang dana di tepi-tepi jalan, dan mengenai kegiatan FPI selanjutnya, saya tidak mengetahui".[12]

4. Januar, umur 45 tahun, wiraswasta. Menurut Bapak Januar yang merupakan salah satu warga yang tinggal di sekitar markas FPI berpandangan:

   " FPI Bukittinggi yang saya lihat sering melakukan kajian setiap minggunya,dan mereka pun sering saya lihat turun ke jalan untuk menggalang dana. Kami sebagai warga dengan adanya markas FPI tidak terganggu atau takut sebagaimana pemberitaan media, karena sejauh yang saya ketahui orang-orang FPI Bukittinggi ramah dan santun terhadap warga sekitar."[13]

B. Pandangan Politik Front Pembela Islam Kota Bukittingi

Dalam *amar ma'ruf nahi munkar* FPI mencoba merangkainya menjadi metode perjuangan termasuk di dalamnya kegiatan politik. Merujuk pada Al-Qur'an surat Ali Imran 104:

هُمُ وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ ٱلْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِّنكُمْ وَلْتَكُن

ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: *Dan hendaklahada di antarakamusegolonganumat yang menyerukepadakebajikan, menyuruhkepada yang ma'rufdanmencegahdari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

[11]Wirdiana Safitri, *wawancara pribadi*, hari Senin tanggal 23 Juli 2018
[12]Ayu Silvia Putri, mahasiswa, *wawancara pribadi*, hari Senin tanggal 23 Juli 2018
[13]Januar, wiraswata, *wawancara pribadi*, hari Senin tanggal 23 Juli 2018

FPI tidak berafiliasi terhadap salah satu kekuatan politik tertentu. FPI menyatakan sikap netral dan terarah. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak berkampanye untuk satu partai politik tertentu, sedangkan terarah berarti FPI hanya mendukung partai Islam yang memperjuangkan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk-Nya dengan menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dengan ungkapan lain, penegakkan moral dan agama merupakan agenda dan kegiatan FPI yang utama.[14]

Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Busra pada wawancara yang penulis lakukan :

> "FPI tidak mengikuti politik praktis dan orang FPI tidak boleh buta dengan politik. Bagi FPI untuk mencapai cita-cita FPI di Indonesia yaitu menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyari'ah dan untuk mencapai cita-cita itu kita akan mendukung partai-partai dan politisi-politisi yang berani untuk menegakkan syari'at itu. Bukan kita tidak berpolitik, tapi bukan pelaku politik praktis karena FPI bukan organisasi politik tapi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah islamiyah, *hisbah* dan *jihad fiisabilillah* untuk tegaknya syari'at Islam di muka bumi."[15]

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Khairul Azmi:

> "Anggota FPI dianjurkan untuk berpolitik, tapi tidak sebagai pelaku politik praktis. Bagi pengurus FPI yang ingin menjadi pelaku politik praktis maka dia dikeluarkan dari keanggotaan FPI, karena di dalam organisasi FPI tidak boleh adanya rangkap jabatan. Alasannya karena dikhawatirkan dengan rangkap jabatan tersebut dia tidak dapat maksimal dalam mengemban amanah yang diberikan baik di FPI maupun di bidang politik."[16]

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Inyiak Yustanur mengenai pandangan politik FPI:

---

[14]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*..., h. 136-137

[15]Buya Busra, Imam Besar FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

[16]Ustadz Khairul Azmi, Ketua DPW Bukittinggi 2018-2023, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

> "Bahwa FPI tidak berafiliasi dengan partai politik maupun pemerintah, dia memiliki AD/ART sendiri. Berdirinya FPI di Indonesia tidak terdapat kepentingan di dalamnya, hal ini murni sebagai organisasi yang bertujuan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*".[17]

Dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis dapat dijelaskan bahwa pandangan politik FPI Bukittinggi adalah menuju Negara Republik Indonesia Bersyari'ah dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, FPI melarang pengurusnya bertindak sebagai praktisi politik akan tetapi FPI ikut ambil peran dalam dunia politik dengan mendukung partai-partai dan politisi-politisi yang berani menegakan syari'at di Indonesia dan di Bukittinggi khususnya.

Dalam memandang agama dan negara, FPI berpandangan bahwa agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Buya Busra:

> "Pandangan FPI terhadap agama dan negara khususnya NKRI bahwa tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara. Bahkan di Indonesia dalam hidup bernegara setiap warga wajib meyakini salah satu agama, tidak boleh menista agama. Hasil kesepakatan para ulama : meletakkan keyakinan terhadap Tuhan menjadi dasar pondasi utama di Indonesia."[18]

Dari itulah perjuangan FPI di Indonesia untuk mewujudkan NKRI bersyari'ah di segala aspek hukum, ibadah, mu'amalah, munakahat dan jinayah. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Ustadz Khairul Azmi dan Rusdi mengatakan hal senada bahwa FPI memandang agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan cita-cita FPI untuk mewujudkan NKRI bersyari'ah adalah dengan menegakkan hukum Islam secara kaffah di Indonesia.

---

[17]Inyiak Yustanur, Ketua DPD FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Rabu tanggal 18 Juli 2018

[18]Buya Busra, Imam Besar FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

Dalam memandang perpolitikkan Indonesia di tahun 2019 , FPI memiliki pandangan bahwa:

Rezim yang sekarang ini adalah rezim yang tidak mendengarkan ulama, rezim yang mengatur negara ini acak-acakkkan, rezim yang banyak bohongnya. Contohnya pemerintah akan membeli saham indosat, sampai sekarang belum ada perubahan bahkan rezim sekarang adalah rezim yang suka mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang mau menegakkan kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa FPI sangat mendukung suara rakyat yang ingin 2019 ganti presiden.[19]

Dari penuturan tersebut penulis dapat melihat bahwa FPI adalah salah satu ormas yang merasa kecewa dengan pemerintahan saat ini. Begitu banyak janji yang belum terpenuhi serta kegiatan-kegiatan pemerintah yang cenderung mengkriminalisasi ulama, dan FPI merupakan salah satu ormas yang mendukung gerakan ganti presiden di tahun 2019 yang akan datang.

FPI sebagai organisasi masyarakata dalam menghadapi pemilu 2019 memang tidak beraviliasi pada satu partai tertentu, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Busra tentang partai politik di Indonesia:

FPI memang tidak berafiliasi pada satu partai tertentu, tetapi FPI mendukung seluruh partai yang tidak menista agama dan tidak mendukung penista agama. Di Indonesia partai politik dapat di golongkan menjadi tiga. Pertama, hizbullah yaitu partai yang mau menjunjung tinggi agama Allah, hizbusyaitan yaitu partai syaitan seperti PDIP dan partai abu-abu yaitu partai yang mendukung penista agama seperti Demokrat, Nasdem, Golkar. [20]

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khairul Azmi:

Dalam menghadapi pemilu 2019 FPI memberikan kebebasan suara kepada seluruh anggota untuk mendukung 5 partai yang dianggap memiliki visi

[19]Buya Busra, Imam Besar FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

[20]Buya Busra, Imam Besar FPI Sumatera Barat, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

menegakkan syari'at yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[21]

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa FPI memang bukan organisasi yang berafiliasi pada satu partai politik tertentu, tetapi ikut berperan dalam perpolitikkan yang sedang berlangsung di Indonesia. FPI dengan cita-cita NKRI Bersyari'ah menjadikan politik sebagai ladang dakwah untuk menuju cita-cita tersebut.

C. Analisa Penulis terhadap Gerakan dan Pandangan Politik FPI Bukittinggi

Front Pembela Islam (FPI) yang dikenal sebagai Islam Radikal kelompok yang memiliki keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk mengganti tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung dan menggantinya dengan syari'at Islam. Dalam kegiatan mereka seringkali menggunakan aksi-aksi keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka dan seringkali bergerak secara bergeriliya.[22]

Dari pemaparan tersebut penulis mencoba menganalisis dengan mengunakan teori dan data yang penulis dapatkan tentang gerakan FPI Bukitinggi. Penulis disini berpendapat bahwa FPI Bukittinggi secara gerakan bukanlah gerakan radikal karena tidak termasuk kedalam kategori ciri-ciri radikal secara umum yaitu mereka sering menunjukkan mentalitas perang salib, adanya

[21]Ustadz Khairul Azmi, Ketua DPW Bukittinggi 2018-2023, *Wawancara Pribadi*, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018

[22]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*...,h. 10

penegakkan hukum Islam yang juga kerap diupayakan dengan keras oleh kalangan revivalis dan fundamentalisme muslim tidak lagi dianggap sebagi sebuah jalan alternatif melainkan sudah menjadi suatu keharusan, terdapat kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut sistem-sistemnya yang mapan tapi dianggap tidak sah, dan semangat untuk menegakkan agama sebagai lambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan di dunia dengan alasan jihad dengan sendirinya mendapatkan tempat yang sangat terhormat dan dari gerakan yang FPI lakukan tidak ada yang berupa tindakan seperti ciri-ciri gerakan radikal.

FPI Bukittinggi bukanlah termasuk organisasi yang mencoba menjadikan dasar negara Pancasila dengan Syari'at Islam dengan bahasa lain bahwa FPI bukan lah organisasi yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Sesuai dengan pengertian radikalisme itu sendiri yaitu aliran atau faham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras. Dan dari aksi FPI selama ini tidak ada yang menyuarakan negara Islam.

Front Pembela Islam (FPI) Kota Bukittinggi telah berdiri selama 7 tahun. Gerakan yang memilih dakwah, *hisbah* (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan jihad *fiisabilillah* menjadi medan dakwah ini telah berkonstribusi banyak terhadap perkembangan syari'at Islam Bukittinggi.

Beberapa program kerja dari FPI yang secara umum bersifat ke arah sosial dan kemasyarakatan, serta dalam *nahi munkar* FPI ikut dalam mengatasi maksiat yang terdapat di Kota Bukittinggi.Dari data yang penulis dapatkan di lapangan

yaitu dengan melakukan wawancara dengan pengurus FPI Bukittinggi dan anggota Laskar beserta turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan FPI Bukittinggi penulis tidak mendapatkan satupun aksi dari FPI Bukittinggi yang berunsur kekerasan atau dikenal dengan sikap radikal.

Kegiatan yang mereka lakukan seperti penggalangan dana korban bencana alam, aksi penggalangan dana untuk korban Palestina, aksi bersih-bersih mesjid, penanaman pohon, sunnatan massal, tablig-tablig akbar serta ikut dalam mengadakan pengawasan pada malam tahun baru di Kota Bukittinggi.

Dari penjelasan yang penulis dapatkan dari dalam melakukan *hisbah*, FPI Bukittinggi juga tidak menggunakan cara kekerasan ataupun main hakim sendiri, karena apa yang mereka lakukan telah dikompromikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib. Ketegasan sikap dan upaya pembelaan diri harus di tanamkan dengan erat pada diri seluruh anggota FPI, karena sesuai dengan semboyan dari FPI adalah mati syahid atau hidup mulia, dan segala perjuangan yang dilakukan oleh FPI berdasarkan keikhlasan semata untuk menegakkan syari'at Islam.

FPI secara gerakan,bukanlah gerakan radikal tetapi menurut penulis FPI adalah organisasi yang memiliki ideologi radikal. Hal ini dapat penulis lihat dari beberapa ideologi yang menjadi dasar pergerakan. Pertama visi misi FPI yaitu penerapan Syari'at Islam secara kaaffah di Indonesia. Menurut FPI Islam yang kamil (sempuna) dan syamil (menyeluruh). Maksudnya adalah mengatur masalah dan tata cara kehidupan manusia yang bersifat umum dan khusus. Di dalam apapun, seorang muslim harus tunduk pada aturan Islam secara utuh dan tidak

setengah-setengah.

Menurut FPI menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu-satunya menghindari kezaliman dan kemungkaran. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* diperlukan sikap tegas dan totalitas, hingga lahirlah motto dari perjuangan FPI adalah *'Isy Kariman aw Mut Syahidan*, hidup mulia atau mati syahid.

Dari prinsip tersebut dapat dilihat bahwa jika suatu kejadian itu termasuk kegiatan maksiat dari pandangan FPI, maka penegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan meskipun dengan nyawa tantangannya karena menurut FPI jika kita berjuang untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di permukaan bumi sebagaimana yang telah diperintahkan maka balasannya adalah syurga. Jadi pengembalian tatanan yang ingin dituju dari FPI bukan diaplikasikan secara gerakan tetapi dengan ideologi-ideologi dan prinsip organisasi.

Mengenai pandangan politik dari FPI Bukittinggi, menurut analisa penulis FPI bukan lah organisasi politik tetapi murni organisasi masyarakat Islam yang juga menjadikan politik sebagai salah satu jalan untuk menegakkan syari'at. Hal ini nampak bahwa FPI mengeluarkan pengurusnya yang ikut dalam politik praktis, akan tetapi mereka ikut dalam mendukung seluruh anggota FPI yang memilih menjadi politik praktis. FPI mendukung seluruh partai-partai dan politisi yang berani dalam menegakkan syari'at Islam.

Menurut penulis dari hasil wawancara mengenai pandangan FPI tentang politik Indonesia sekarang yaitu FPI memang bukan salah satuorganisasi politik di Indonesia tetapi FPI adalah salah satu ormas yang ikut berperan penting dalam

arus politik di Indonesia. Dengan gerakan FPI dalam amar ma'ruf nahi mungkar dapat meyatukan umat Islam dalam satu suara, meski di sini FPI tidak memiliki tujuan politik tertentu tapi dengan menjadikan politik sebagai lahan dakwah dapat menjadi satu jalan bagi FPI untuk menuju cita-citanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Front Pembela Islam merupakan organisasi keagaamaan yang memiliki cita-cita menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersyari'at, khususnya di Kota Bukittinggi. Kehadiran FPI Bukittinggi menjadikan organisasi ini sebagai garda terdepan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Organisasi yang telah berdiri selama 7 tahun di Bukittinggi memiliki program kerja yaitu membela agama, melayani umat dan menjadi benteng sunni dalam memelihara akidah.

Setelah melakukan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai gerakan dan pandangan politik Front Pembela Islam Bukittinggi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. FPI Bukittinggi bukan lah gerakan radikal, karena tidak terdapat ciri-ciri radikal dari pergerakan organisasi ini, yang mana secara umum gerakan radikal adalah gerakan yang cenderung menggunakan kekerasan dalam mengganti sistem yang ada. Front Pembela Islam Bukittinggi merupakan organisasi Islam yang sportif dan teguh dengan titah perjuangannya, yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Semenjak didirikannya FPI di Kota Bukittinggi telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini baik dalam segi sosial kemasyarakatan maupun dalam mengatasi maksiat di muka bumi. Sebagai garda terdepan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, FPI adalah satu-satunya organisasi yang istiqamah dalam memegang prinsip organisasinya. Tidak ada kekerasan yang diajarkan dalam organisasi ini segala bentuk tindakan yang dilakukan FPI dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* telah sesuai dengan aturan organisasi yang berlindung dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk menjaga kemurnian perjuangan politik, FPI tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak secara politik terhadap satu partai atau kekuasaan tertentu. Hal tersebut dikarenakan FPI adalah organisasi kemasyarakatan bukan organisasi politik. FPI mendukung secara penuh kepada partai-partai dan politisi yang berani untuk menegakkan syari'at. Sebagaimana cita-cita FPI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyari'at. Front Pembela Islam Bukittinggi memiliki pandangan bahwa agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka untuk menegakkan hukum Islam bisa berlaku di Indonesia maka FPI ikut serta dalam sistem demokrasi agar menghasilkan pemimpin yang berani dalam menegakkan syari'at di Indonesia secara kaffah .

B. SARAN

Dari hasil analisa data dan kesimpulan, penulis ingin memberikan saran terhadap FPI Bukittinggi dan juga pembaca:

1. Disarankan kepada ormas terkait untuk tetap memegang prinsip teguh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya di Kota Bukittinggi. Dengan pemberitaan yang sering negatif terhadap keberadaan ormas ini, disarankan kepada Front Pembela Islam juga aktif ber *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menggunakan media massa, karena sekarang media massa telah menjadi salah satu ladang dakwah.
2. Kepada pembaca disarankan untuk lebih objektif dalam menilai sesuatu, jangan memandang FPI dari orang lain. Lihatlah FPI dari titah perjuangan yaitu istiqamah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Front Pembela Islam Tahun 2013

Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers.

Al- Zastrouw Ng. 2006. *Gerakan Islam Simbolik: Parta Kepentingan FPI*. Yogyakarta: PT PLKiS Pelangi Aksara.

Amirin, Tatang M. 1995.*Menyusun Rencana Penelitian,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Arfina, Eka Yani. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan EYD dan Singkatan Umum*. Surabaya: Tiga Dua. Tt

Bayad, M. Sadidul Bayad. *Gerakan Front Pembela Islam (FPI) di Pasuruan Tahun 2015-2017*. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Sunan Apel Surabaya. 2017

Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1992/1993), Jilid III

Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.* Jakarta: Paramadina.

Fanani, Zainuddin. 2004. *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Prees

Hendri, Novi. 2004. *Sejarah Pergerakan Islam Di Indonesia*. Hayfa Press

Husaini ,Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

Ismail, Ari Febriansyah Ismail. *Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar*. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. 2016

Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution. 2012. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Jamhari, Jajang Jahroni. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Juhdi, Muhammad Harfin. Karakteristik Pemikiran Hukum Islam. Jurnal Ahkam, Vol XIV, No.2 Juli 2004

Kamil, Sukron. 2013, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana

Mohammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Tarjamah Sunat At Tirmidzi*, penerjemah: Drs. H.Moh. Zuhri, Dipl, TAFL., dkk,(Semarang: CV. Asy Syifa',tt), h.109.

Muhammad Harfin Juhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol XIV, No.2, Juli 2004

Nurdin, Abdul Hayyie Al- Kattani. 2000. (*Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*). Terjemahan kitab Al- Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah Wal-Wilayatuddiniyah*. Jakarta: Gema Insani Prees

Prosedur Standar Front Pembela Islam Tahun 2013

Rubaidi, Variasi Gerakan Radikal di Indonesia, Analisi Vol XI,no 1, Juni 2011

Sdajzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Edisi V. Jakarta: UI Press

Soekarno. 1964. *Di Bawah Bendera Revolus*i. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi

Suhelmi, Ahmad. 2011. *Polemik Negara Islam: Soekrano vs Natsir*. Jakarta: UI-Press

Taher, Tarmizi... [et.al]. 1998. *Radikalisme Agama*; editor, Bahtiar Efendy, Hendro Prasetyo. Jakarta: PPIM

Toto Suharto. *Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia*, Jurnal Studi Keislaman. Vol 9, No.1, September 2014

Tualeka, M. Wahid Nur. *Gerakan Neomodernis Islam di Indonesia (Perpektif Cak Nur dan Gus dur).* Al- Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama/Vol. 1. 2015

Rahmat, M.Imadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal*. Jakarta: Erlangga

Rahman, Fazlur. 1985. *Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa ini*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (penyunting), Perkembangan Modern dalam Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia .

Http://www.academia.edu/31367740/Muslim_Moderat_Pemetaan_Ideol_Ogo_Organisasi_Massa_Islam_di Indonesia

Http://www.liputan6.com.html&ic.id-

http://www.fpisumbar.com/2017/11tentang-kami.html&lc=id-

http://www.fpisumbar.com/2017/11

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 225 /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Tata Negara**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Leli Ramayanis** NIM. **1314012** tanggal 26 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Gerakan Radikal di Indonesia (Studi Front Pembela Islam (FPI) Bukittinggi)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. H. Ismail, M.Ag**
NIP	:	19680409 199403 1 008
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP	:	19790714 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Pengantar Ilmu Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Fiqih
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 24 April 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/324/ KB-KKP/2018

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang :
a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-290.2/In.26.2/TL.00.1/06/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Perihal Mohon Izin Penelitian.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	: **LELI RAMAYANIS**
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Puar, 22 Mei 1996
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Sungai Puar Kec. Palembayan
Nomor Identitas	: 1306116205960002
Judul Penelitian	: Front Pembela Islam (FPI) Bukittinggi (Studi Gerakan dan Pandangan Politik).
Lokasi Penelitian	: 1. Kantor DPW FPI Bukittinggi
Waktu Penelitian	: **21 Juni 2018 s / d 21 Agustus 2018**
Anggota Penelitian	: -
Digunakan Untuk	: Menyelesaikan Skripsi Guna Meraih Gelar S1 pada IAIN Bukittinggi

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 22 Juni 2018

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI * KANTOR KESBANG POL

DELISMAN,S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
3. Arsip

Hasil Wawancara

Narasumber: Yustanur
Umur: 45 tahun
Jabatan: Dewan Tanfidzi FPI Sumatera Barat
Pekerjaan: wiraswasta

1. Apa-apa saja kegiatan yang telah dilakukan FPI Bukittinggi?
   Jawab: FPI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang mencangkup seluruh kegiatan sosial masyarakat. Seperti kegiatan penggalangan dana korban bencana alam, tablig-tablig akbar serta ikut mengadakan pengawasan pada malam tahun baru di Kota Bukittinggi

2. Bagaimanakah peran FPI Bukittinggi dalam mengatasi kemaksiatan di Bukittinggi?
   Jawab: FPI sangat totalitas dalam mengatasi kemaksiatan, FPI juga bekerja sama dengan aparat terkait untuk mengatasi kemaksiatan yang terjadi

3. Bagaimana pandangan Bapak dengan pemberitaan FPI merupakan gerakan aliran keras?
   Jawab: tidak ada radikal atau kekerasan di dalam Front Pembela Islam. yang dilakukan hanya bentuk ketegasan sikap dalam bernegara dan agama

4. Bagaimana prinsip FPI Bukittinggi sebagai organisasi yang bergerak untuk menegakkan amar *ma'ruf nahi munkar*?
   Jawab: ketegasan sikap dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar serta menjalankan prosedur yang telah diatur dalam AD/ART dari melakukan negoisasi, mediasi, memberikan Surat Peringatan, melakukan demo dan aksi

5. Apa yang dimaksud dengan NKRI Bersyari'ah oleh FPI?
   Jawab: bersatunya umat Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyari'ah, yaitu dalam hukum Islam. FPI mengakui pemerintahan sekarang yang ada di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara

6. Bagaimana pandangan FPI terhadap hubungan agama dan negara?
   Jawab: agama dan negara adalah dua hal yang saling berkaitan, untuk menegakkan syari'at salah satunya diperlukan pemerintahan dan agar pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik dibutuhkan agama sebagai pondasi utama

7. Bagaimana pandangan FPI terhadap politik secara umum?
   Jawab: FPI tidak ada berafiliasi dengan politik atau pemerintahan tertentu. FPI memiliki AD/ART yang tidak terikat dengan apapun, dia berdiri sendiri.

Bukittinggi, Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

YUSTANUR

Hasil Wawancara

Nama: Faisal Basir Djambek
Umur:70tahun
pekerjaan: pengikut ulama
Alamat: Pasar Bawah Bukittinggi

1. Apa Bapak mengetahui apa itu Front Pembela Islam?
   Jawab: saya mengetahui, yaitu organisasi Islam yang sangat berkomitmen dalam menegakkan amar ma;'ruf nahi munkar di Indonesia

2. Sejak kapan Bapak mengetahui keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: sejak 2012 saya sudah mengikuti perkembangan FPI di Bukittinggi
3. Apa-apa saja aksi dari FPI yang Bapak ketahui?
   Jawab: kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial FPI sangat banyak, akan tetapi jarang di sebarakan ke media. Akan tetapi kegiatan-kegiatan lainnya dianggap radikal.

4. Bagaimana pendapat Bapak dengan pemberitaan bahwa FPI merupakan aliran keras?
   Jawab: FPI bukanlah organisasi gerakan radikal, tetapi FPI adalah organisasi yang sportif, konsekuen dengan titah perjuangannya. Akan tetapi pihak-pihak lain menganggap kesportifitasannya itu dia dianggap radikal. Kita harus memandang FPI secara objektif bukan dari pandangan orang lain. FPI memiliki istiqamah dalam perjuangannya dan kita harus menghayati FPI itu singkatan dari Front Pembela Islam, kata front artinya terdepan, maka dari itulah dia banyak mendapat banyak serangan

5. Bagaimana pandangan Ibuk dengan keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: saya sangat mendukung penuh kegiatan FPI di Bukittinggi, karena sejauh yang saya ketahui FPI adalah organisasi massa yang sangat totalitas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

Bukittinggi, 23 Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

Faisal Bashir Djambek

Hasil Wawancara

Nama: Ayu Silvia Putri
Umur:22tahun
pekerjaan: mahasiswa
Alamat: Bukittinggi

1. Apa saudara mengetahui itu Front Pembela Islam Bukittinggi?
   Jawab: saya mengetahui, yaitu salah satu ormas Islam

2. Sejak kapan saudara mengetahui keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: sejak saya menjadi mahasiswa saya sudah mengetahui FPI, dan untuk FPI Bukittinggi saya sudah mengetahuinya 4 tahun yang lalu

3. Apa-apa saja aksi dari FPI yang saudara ketahui?
   Jawab: aksi penggalangan dana

4. Bagaimana pendapat saudara dengan pemberitaan bahwa FPI merupakan aliran keras?
   Jawab: saya tidak tertalu mengetahui tentang FPI secara umum

5. Bagaimana pandangan saudara dengan keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: ketika mendengar kata FPI yang tergambar adalah orang-orang yang suka berkelahi, berambut gondrong dan sering melakukan demontrasi. Saya fikir begitu pun dengan FPI Bukittinggi

Bukittinggi, 23 Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

Ayu Silvia Putri

Hasil Wawancara

Nama: Januar
Umur:45tahun
pekerjaan: wiraswasta
Alamat: Anak Aia, Mandiangin

1. Apa Bapak mengetahui apa itu Front Pembela Islam Bukittingi?
   Jawab: saya mengetahui, karena rumah saya berdekatan dengan markas mereka

2. Sejak kapan Bapak mengetahui keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: sejak aksi 212 di Jakarta

3. Apa-apa saja aksi dari FPI yang Bapak ketahui?
   Jawab: penggalangan dana, aksi bersih-bersih mesjid dan pengajian rutin mereka

4. Bagaimana pendapat Bapak dengan pemberitaan bahwa FPI merupakan aliran keras?
   Jawab: saya tidak setuju, karena saya bukan orang yang begitu langsung percaya dengan media, karena apa yang saya lihat terhadap FPI Bukittinggi tidak ada aksi mereka yang menggunakan kekerasan

5. Bagaimana pandangan Bapak dengan keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: saya sangat mendukung penuh kegiatan FPI di Bukittinggi, saya sebagai warga terdekat dengan markas kehadiran mereka dapat sebagai tempat belajar agama, dengan ikut taklim dari FPI serta keramah tamahan anggotanya membuat warga sekitar tidak terganggu dengan keberadaan FPI

Bukittinggi, 23 Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

Januar

Hasil Wawancara

Narasumber: Busra
Umur: 45 tahun
Jabatan: Imam Besar FPI Sumatera Barat
Alamat: Ponggongan Bawah, Jorong Lasi Mudo
Pekerjaan: wiraswasta

1. Apa-apa saja kegiatan yang telah dilakukan FPI Bukittinggi?
   Jawab: begitu banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh FPI Bukittinggi, terutama di bidang sosial dan kemasyarakatan. Seperti aksi penggalangan dana untuk korban bencana alam baik di daerah Sumatera Barat maupun Indonesia, aksi sunatan massal dan penanaman pohon untuk daerah agam.

2. Bagaimanakah peran FPI Bukittinggi dalam mengatasi kemaksiatan di Bukittinggi?
   Jawab: sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan tugas pemerintah, namun apabila pemerintah tidak mau atau tidak mampu karena banyak kepentingan maka tugas tersebut merupakan tugas semua umat Islam, jadi FPI membantu umat Islam agar terlaksanakannya amar ma'ruf nahi munkar.

3. Bagaimana pandangan Bapak dengan pemberitaan FPI merupakan gerakan aliran keras?
   Jawab: menurut saya biasa saja, karena kami FPI merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bertindak. Segala aturan dalam bertindak telah di jelaskan dalam pedoman organisasi. Pemberitaan media tersebut karena ada pihak-pihak yang tidak suka dengan FPI yang berani dalam menegakkan kebenara. Seperti apa yang disampaikan Imam Syafi'i " saya bukannya tidak bisa menjawab ucapan-ucapan dan perkataannmu, tapi sesungguhnya singa tidak akan pernah mempedulikan gonggongan anjing." Jadi FPI tidak begitu peduli dengan apa yang di sampaikan media, bahkan dengan pemberitaan tersebut membuat FPI semangkin dikenal publik.

4. Bagaimana prinsip FPI Bukittinggi sebagai organisasi yang bergerak untuk menegakkan amar *ma'ruf nahi munkar*?
   Jawab: upaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam FPI disebut juga dengan istilah hisbah. Dalam menegakkan *hisbah* diperlukan sikap yang tegas berbentuk seruan kepada pemegang kekuasaan (pemerintah).

5. Apa yang dimaksud dengan NKRI Bersyari'ah oleh FPI?
   Jawab: NKRI Bersyari'ah merupakan cita-cita dari FPI yaitu berlakunya syariat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bidang ibadah, munakahat,mu'amalah, maupun jinayah. Karena menurut kami hukum Islam adalah hukum yang efektif dan efisien.

6. Bagaimana pandangan FPI terhadap hubungan agama dan negara?
   Jawab: agama dan negara adalah khusunya NKRI tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara. Bahkan di Indonesia dalam hidup bernegara setiap warga wajib meyakini salah satu agama, sehingga atheis tidak berhak hidup di NKRI dan tidak boleh menista agama apapun. Hasil kesepakatan para pendiri negara meletakkan keyakinan terhadap Tuhan menjadi pondasi utama di NKRI.

7. Bagaimana pandangan FPI terhadap politik secara umum?
   Jawab: FPI tidak mengikuti politik praktis dan orang FPI tidak boleh buta dengan politik. Bagi FPI untuk mencapai cita-cita FPI di Indonesia yaitu menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyari'ah dan untuk mencapai cita-cita itu kita akan mendukung partai-partai dan politisi-politisi yang berani untuk menegakkan syari'at itu. Adanya larangan terhadap pengurus FPI untuk berpolitik praktis dikarenakan FPI bukan organisasi politik tetapi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah islamiyah, hisbah dan jihad fiisabilillah untuk tegaknya syari'at Islam di muka bumi

8. Bagaimana pandangan FPI terhadap perpolitikkan Indonesia di tahun 2019?
   Jawab: Rezim yang sekarang ini adalah rezim yang tidak mendengarkan ulama, rezim yang mengatur negara ini acak-acakkkan, rezim yang banyak bohongnya. Contohnya pemerintah akan membeli saham indosat, sampai sekarang belum ada perubahan bahkan rezim sekarang adalah rezim yang suka mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang mau menegakkan kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa FPI sangat mendukung suara rakyat yang ingin 2019 ganti presiden

Bukittinggi, 21 Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

FRONT PEMBELA ISLAM

BUSRA

IMAM DPD - FPI
SUMATERA BARAT

Hasil Wawancara

Nama: Khairul Azmi
Umur: 46 tahun
Jabatan: Ketua Umum DPW FPI Bukittinggi
Alamat: Simpang Canduang, Ampek Angkek
Pekerjaan: wiraswasta

1. Apa-apa saja kegiatan yang telah dilakukan FPI Bukittinggi?
   Jawab: FPI Bukittinggi yang memiliki program utama yaitu di bidang sosial dan kemasyarakatan. Dimulai dari kegiatan bersih-bersih mesjid, kajian rutin serta penggalangan dana untuk palestina. Semua kegiatan itu dilaksanakan dengan keikhlasan tanpa ada bantuan dana dari pihak apapun

2. Bagaimanakah peran FPI Bukittinggi dalam mengatasi kemaksiatan di Bukittinggi?
   Jawab: FPI sebagai garda terdepan memiliki sikap tegas dalam mengatasi kemaksiatan di Bukittinggi

3. Bagaimana pandangan Bapak dengan pemberitaan FPI merupakan gerakan aliran keras?
   Jawab: FPI tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Apa yang diberitakan oleh media itu dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan karena keberaniaan FPI dalam menegakkan kebenaran.

4. Bagaimana prinsip FPI Bukittinggi sebagai organisasi yang bergerak untuk menegakkan amar *ma'ruf nahi munkar*?
   Jawab: upaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam FPI disebut juga dengan istilah hisbah. Dalam menegakkan *hisbah* diperlukan sikap yang tegas berbentuk seruan dan instruksi kepada pemegang untuk berbuat kebaikan.

5. Apa yang dimaksud dengan NKRI Bersyari'ah oleh FPI?
   Jawab: pemberlakuan hukum Islam di Indonesia secara kaffah. Dalam hal ini FPI bukan lah ingin mewujudkan negara Islam di Indonesia, FPI sangat menjunjung tinggi UUD dan Pancasila, hanya menurut FPI dengan adanya pemberlakuan syari'at Islam merupakan langkah yang tepat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar

6. Bagaimana pandangan FPI terhadap hubungan agama dan negara?

Jawab: agama dan negara adalah khusunya NKRI tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara. Bahkan di Indonesia dalam hidup bernegara setiap warga wajib meyakini salah satu agama, tidak boleh menista agama. Hasil kesepakatan para ulama: meletakkan keyakinan terhadap Tuhan menjadi pondasi utama di Indonesia.

7. Bagaimana pandangan FPI terhadap politik secara umum?
   Jawab: FPI tidak mengikuti politik praktis dan orang FPI tidak boleh buta dengan politik. Bagi pengurus FPI tidak boleh berpolitik praktis, jika ingin berpolitik praktis maka dikeluarkan dari keanggotaan pengurus karena di dalam FPI tidak boleh adanya rangkap jabatan.

8. Bagaimana pandangan FPI terhadap perpolitikkan Indonesia di tahun 2019?
   Jawab: Samia'na wa 'ata'na artinya apa yang diarahkan dari Imam Besar DPP maka semua anggota FPI harus ikut karena apa yang telah menjadi keputusan Imam Besar itu adalah hasil dari keputusan bersama serta ijtihad dari ulama. FPI mendukung partai politik yang berani dan mau menegakkan syari'at.

Bukittinggi, 21 Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

Khairul Azmi

Hasil Wawancara

Narasumber: Afriwal
Umur: 22 tahun
Jabatan: Simpatisan FPI Bukittinggi
Alamat: Aur Kuning
Pekerjaan: Mahasiswa

1. Apa alasan saudara untuk ikut sebagai anggota FPI Bukittinggi?
   Jawab: saya tertarik untuk bergabung dengan FPI dikarenakan aksi FPI yang sangat totalitas dalam membela agama Allah seperti yang terjadi pada aksi 212.

2. Apa saja kegiatan FPI yang sudah saudara ikuti ?
   Jawab: dikarenakan saya masih berstatus mahasiswa jadi saya hanya ikut ketika waktu kosong, seperti ikut dalam pengawasan tahun baru 2018, ikut dalam aksi penggalangan dana Palestina serta taklim-taklim rutin yang dilakukan FPI Bukittinggi

3. Bagaimana pandangan saudara tentang FPI Bukittinggi:
   Jawab: saya berprinsip jika keberadaan satu kelompok tertentu membawa mashlahah maka harus diikuti dan jika tidak maka harus dihilangkan. Sejauh ini menurut saya FPI Bukittinggi memberikan mashlaha terhadap kehidupan saya

4. Bagaimana pandangan saudara dengan pemberitaan FPI merupakan gerakan aliran keras?
   Jawab: itu tidak benar, kerena sejak saya bergabung dengan FPI tidak pernah sekalipun diajarkan tentang kekerasan di dalam FPI. Bahkan dengan bergabung dengan FPI membawa perubahan yang baik dalam hidup saya baik dari segi keagamaan maupun dari pergaulan. Dan menurut saya jangan hanya terpengaruh dengan pemberitaan media, jika ingin berpendapat tentang FPI silahkan langsung melihat kelapangan.

5. Bagaimana pandangan FPI terhadap hubungan agama dan negara sejauh yang saudara pahami?
   Jawab: di dalam FPI agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dalam kehidupan ini agama merupakan pondasi awal.

Bukittinggi, 21 Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

Afriwal

Hasil Wawancara

Nama: Wirdiana Safitri
Umur:24tahun
Pekerjaan: guru
Alamat: kamang

1. Apa Ibuk mengetahui apa itu Front Pembela Islam?
   Jawab: saya mengetahui, FPI adalah salah satu organisasi masyarakat Islam Indonesia yang memiliki tujuan amar ma'ruf nahi munkar

2. Sejak kapan Ibuk mengetahui keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: sejak saya menjadi mahasiswa saya sudah mengetahui FPI, dan untuk FPI Bukittinggi saya sudah mengetahuinya 3 tahun yang lalu

3. Apa-apa saja aksi dari FPI yang Ibuk ketahui?
   Jawab: aksi FPI yang sangat saya ingat ketika aksi 212, FPI merupak barisan kuat yang sangat membela agama, dan untuk di Bukittinggi saya pernah beberapa kali melihat FPI Buktinggi melakukan penggalangan dana di simpang bypas dan di Lapangan Kantin

4. Bagaimana pendapat Bapak dengan pemberitaan bahwa FPI merupakan aliran keras?
   Jawab: saya tidak setuju dengan pemberitaan tersebut, karena menurut saya FPI adalah organisasi yang sangat berlandaskan syari'at dan juga untuk menegakkan syari'at dan tidak ada di Islam diajarkan kekerasan dalam mencapai tujuan.

5. Bagaimana pandangan Ibuk dengan keberadaan FPI Bukittinggi?
   Jawab: saya sangat mendukung penuh kegiatan FPI di Bukittinggi, karena sejauh yang saya ketahui FPI adalah organisasi massa yang sangat totalitas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terutama di Kota Bukittinggi dengan tingkat kemaksiatan yang cukup tinggi, diperlukan organisasi seperti FPI.

Bukittinggi, 23 Juli 2018

Pewawancara

Leli Ramayanis

Narasumber

Wirdiana Safitri, S.Pd

BIODATA PENULIS



Nama : Leli Ramayanis

Tempat/ tgl lahir : Sungai Puar, 22 Mei 1996

Orang Tua : Mahyudin DT Maruhun (Papa)
Rosdiana (Mama)

Alamat : Jorong Sungai Rotan, Kenagarian Batu Sungai Puar, Kenagarian Sungai Puar, Kecamatan Palembayan, Kab. AGAM, Sumatera Barat

Anak kedua dari empat bersaudara:

1. Wirdiana Safitri, S.Pd
2. Leli Ramayanis
3. Desy Rahmadani
4. Sukma Mardiana

PENDIDIKAN :

1. Taman Kanak-kanak Al Hidayah lulus tahun 2002
2. Sekolah Dasar 31 Sungai Puar lulus tahun 2008
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palembayan lulus tahun 2011
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembayan lulus tahun 2014
5. Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2014-2018)

PENGALAMAN DAN ORGANISASI

1. Pengurus Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah, periode 2015-2016
2. Sekretaris Bidang Sosial Kemahasiswaan Dema Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi periode 2015-2016
3. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara periode 2016-2017
4. Koordinator Keputri Kampus 1 UKMD 'Azzamul 'Iffah periode 2015-2016
5. Ketua Keputrian UKMD 'Azzamul 'Iffah periode 2016-2017